



SEKRETARIAT

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-3912812

Faks : 021-3912-511 dan 021-391-2513

E-Mail : sekretariat@tnp2k.go.id

Website : www.wapresri.go.id



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI BANGKA BELITUNG**



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**Judul: Indikator Kesejahteraan Daerah
Provinsi Bangka Belitung**

Disusun dan Diterbitkan oleh:
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Cetakan Ketiga, November 2011
Cetakan Kedua, Oktober 2011
Cetakan Pertama, Januari 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
© 2011 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Foto Cover: image.azuzu.web.id, bulletin.penataanruang.net

Korespondensi : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3912812
Fax. 021-3912-511 dan 021-391-2513
E-mail: sekretariat@tnp2k.go.id
Website: www.wapresri.go.id



DAFTAR SINGKATAN

ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AKB	: Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
APK	: Angka Partispasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
CFSI	: <i>Composite Food Security Index</i>
DKP	: Dewan Ketahanan Pangan
FIA	: <i>Food Insecurity Atlas</i>
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
HDI	: <i>Human Development Index</i>
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
NTP	: Nilai Tukar Petani
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SAKERNAS	: Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
WFP	: <i>World Food Programme</i>



DAFTAR ISI

Daftar Singkatan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Pertumbuhan Ekonomi.....	1
Inflasi.....	4
Nilai Tukar Petani	5
Tingkat Kemiskinan	6
Indikator Kemiskinan	7
Program Penanggulangan Kemiskinan	8
Tingkat Pengangguran dan Ketenagakerjaan.....	9
Bidang Kesehatan	11
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.....	15
Bidang Pendidikan.....	17
Akses Terhadap Air Bersih	19
Akses Terhadap Sanitasi.....	20
Indeks Pembangunan Manusia.....	21
Komponen Indeks Pembangunan Manusia	22
Ketahanan Pangan.....	23
Prioritas Bidang Pendidikan	26
Prioritas Bidang Kesehatan	28
Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	31
Prioritas Bidang Ketenagakerjaan	34
Bidang-Bidang Prioritas Kesejahteraan Rakyat	35
PNPM Mandiri.....	36
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	38
Keuangan Daerah.....	41

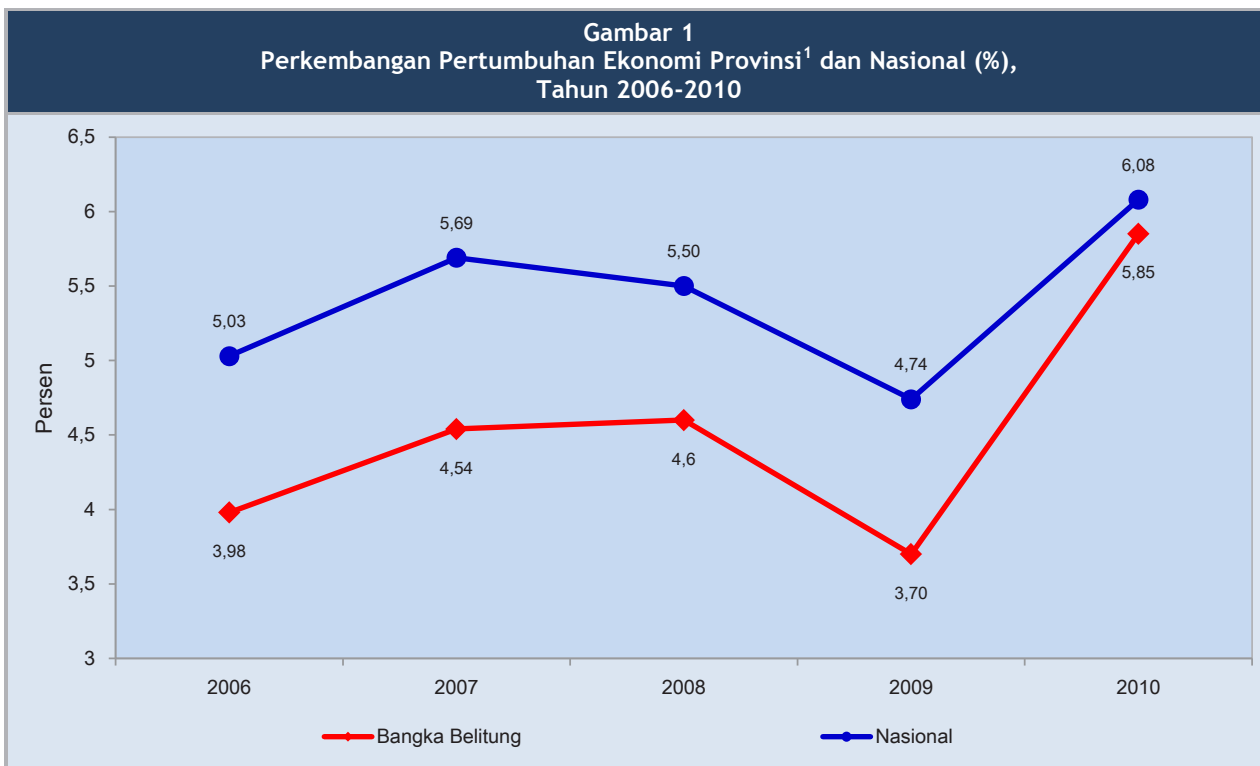


DAFTAR GAMBAR

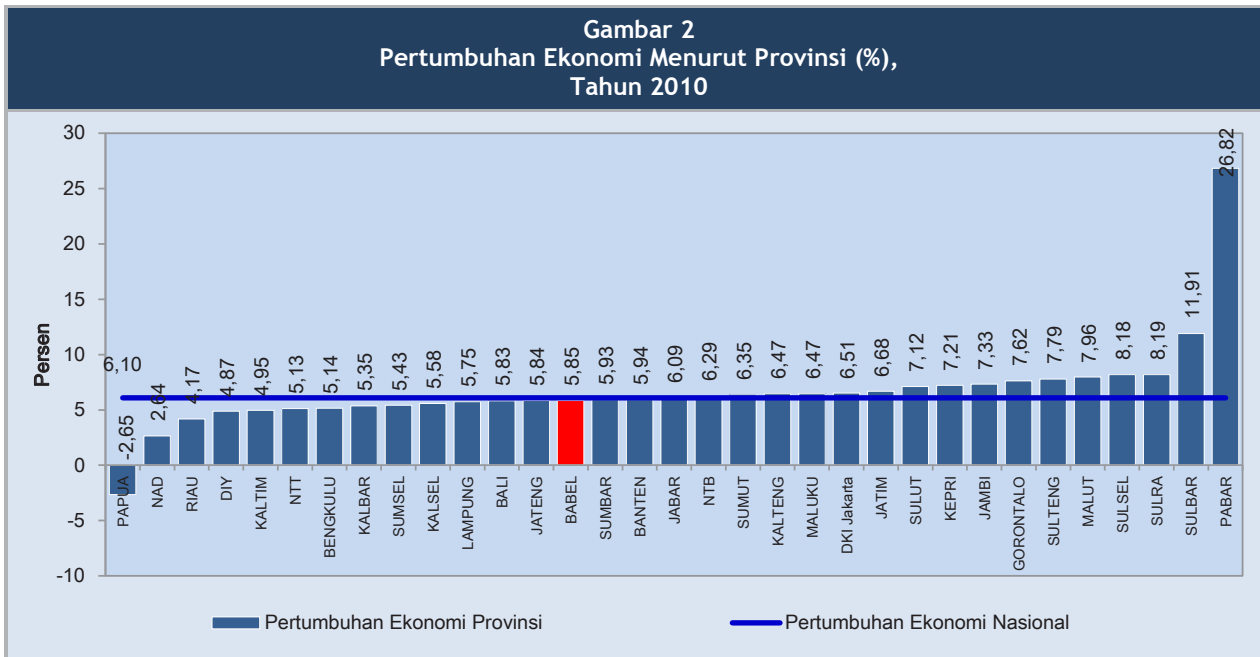
- Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional (%), Tahun 2006-2010
- Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 3. Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Buruh/Karyawan/Pegawai Sebulan Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 4. Perkembangan Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Provinsi Bangka Belitung (%), Tahun 2010-2011
- Gambar 5. Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Menurut 66 Kota Besar di Masing-masing Provinsi (%), (Bulan Juli 2011)
- Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani (Year-on-Year) Provinsi Bangka Belitung, Tahun 2008-2011
- Gambar 7. Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi (%), Bulan Juli 2011
- Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 9. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 10. Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010 dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota
- Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 13. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 14. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007
- Gambar 15. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 16. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 17. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 18. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 19. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2009
- Gambar 20. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 21. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 22. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 23. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009

- Gambar 24. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 25. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 28. Konsumsi Normatif terhadap Produksi Bersih Serealia per Kapita Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 29. Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 30. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun
- Gambar 31. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)
- Gambar 32. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama
- Gambar 33. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Kematian Bayi
- Gambar 34. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi
- Gambar 35. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih
- Gambar 36. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Sanitasi
- Gambar 37. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Listrik
- Gambar 38. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja
- Gambar 39. Komposisi BLM PNPM Mandiri Provinsi Bangka Belitung, Tahun 2011
- Gambar 40. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR di Provinsi Bangka Belitung, 2010 - 2011
- Gambar 41. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR Nasional, 2010 - 2011
- Gambar 42. Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Terserap Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 43. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 44. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Bank Penyalur (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 45. Komposisi Kredit yang Terserap Menurut Bank Penyalur Provinsi Bangka Belitung (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 46. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi, Provinsi Bangka Belitung (Juta Rupiah), Tahun 2010
- Gambar 47. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Bangka Belitung, Tahun 2010

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

¹ Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 merupakan angka sementara dan tahun 2010 merupakan angka sangat sementara.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 1.
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 - 2010

LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)			PDRB Atas Dasar Harga Konstan ADHK 2000 (Miliar Rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000 (Persen)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Pertanian	3.958,0	4.302,1	4.816,7	2.231,8	2.313,7	2.465,3	4,1	3,7	6,6
Pertambangan Dan Penggalian	3.992,3	4.179,5	4.491,0	1.489,4	1.511,1	1.537,8	-0,8	1,5	1,8
Industri Pengolahan	4.803,4	4.972,9	5.361,9	2.213,1	2.276,0	2.349,1	2,9	2,8	3,2
Listrik, Gas & Air Bersih	131,6	145,3	204,6	52,1	56,4	72,8	6,0	8,2	29,1
Bangunan	1.387,6	1.565,8	1.917,9	616,4	672,1	736,1	13,4	9,0	9,5
Perdagangan, Hotel & Restoran	3.945,6	4.205,6	4.589,6	1.944,7	1.981,1	2.104,4	6,7	1,9	6,2
Pengangkutan & Komunikasi	717,9	746,1	877,1	350,5	367,0	406,5	10,3	4,7	10,8
Kuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	492,3	545,2	639,0	333,4	364,7	398,1	4,2	9,4	9,2
Jasa - Jasa	1.992,7	2.319,5	2.807,9	668,5	724,4	796,8	8,9	8,4	10,0
Produk Domestik Regional Bruto	21.421,4	22.982,0	25.705,7	9.899,9	10.266,5	10.866,9	4,6	3,7	5,8

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Tabel 2.
Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008-2010 (Persen)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2009	2010	2010
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian	163.788	166.630	158.341	157.975	191.468
Pertambangan	108.087	120.015	105.122	117.097	117.020
Industri	23.739	27.915	25.017	20.135	26.128
Listrik, gas, dan air Bersih	993	660	1.101	946	759
Bangunan	28.541	25.270	24.898	24.944	26.061
Perdagangan	90.237	98.077	96.043	104.318	125.710
Angkutan dan pergudangan	17.925	15.165	15.621	17.880	15.119
Kuangan dan jasa perusahaan	3.192	4.391	6.775	4.722	5.430
Jasa masyarakat	56.447	71.192	73.366	79.375	77.441
Jumlah	492.949	529.315	506.284	527.392	585.136

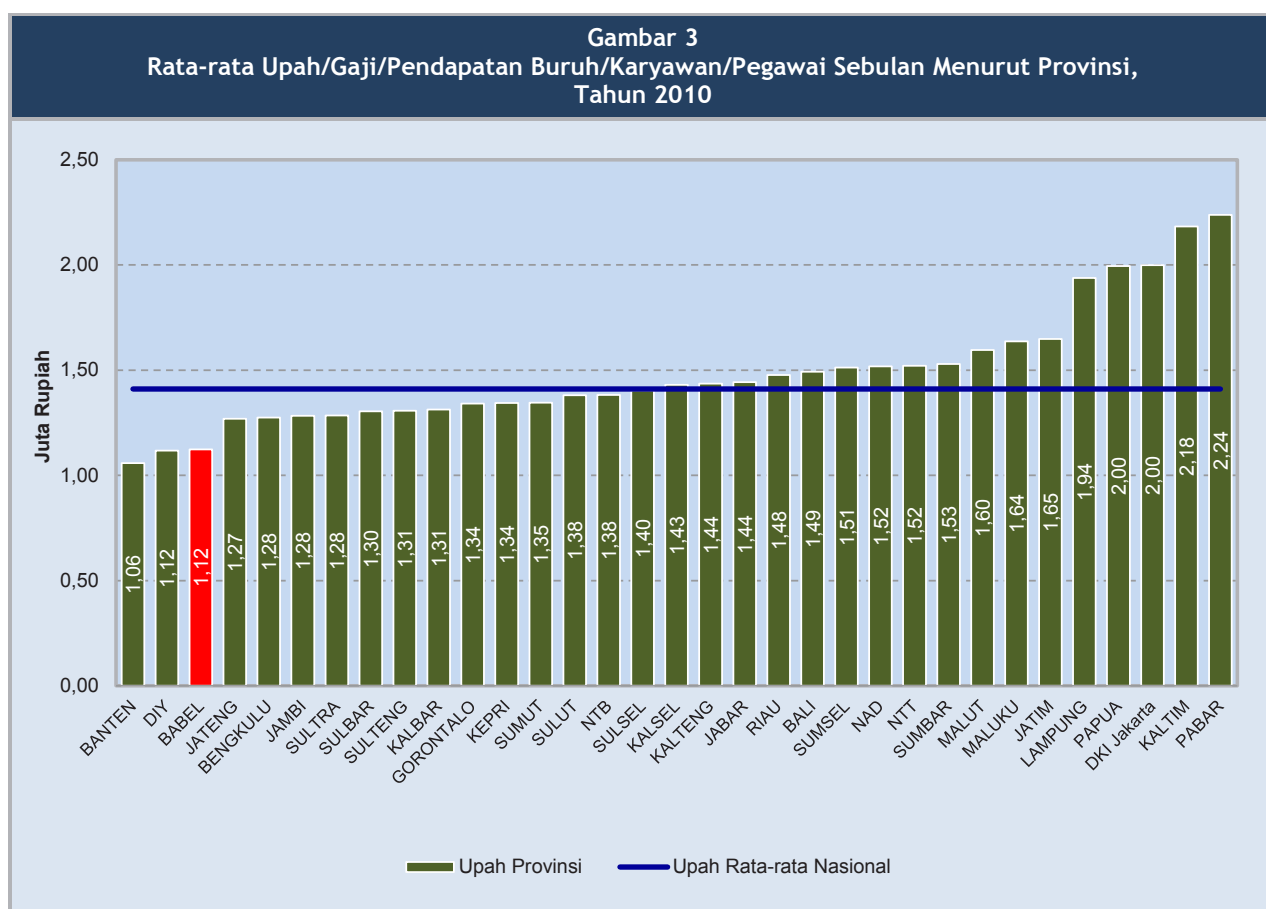
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 3.
Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2008-2010 (Persen)

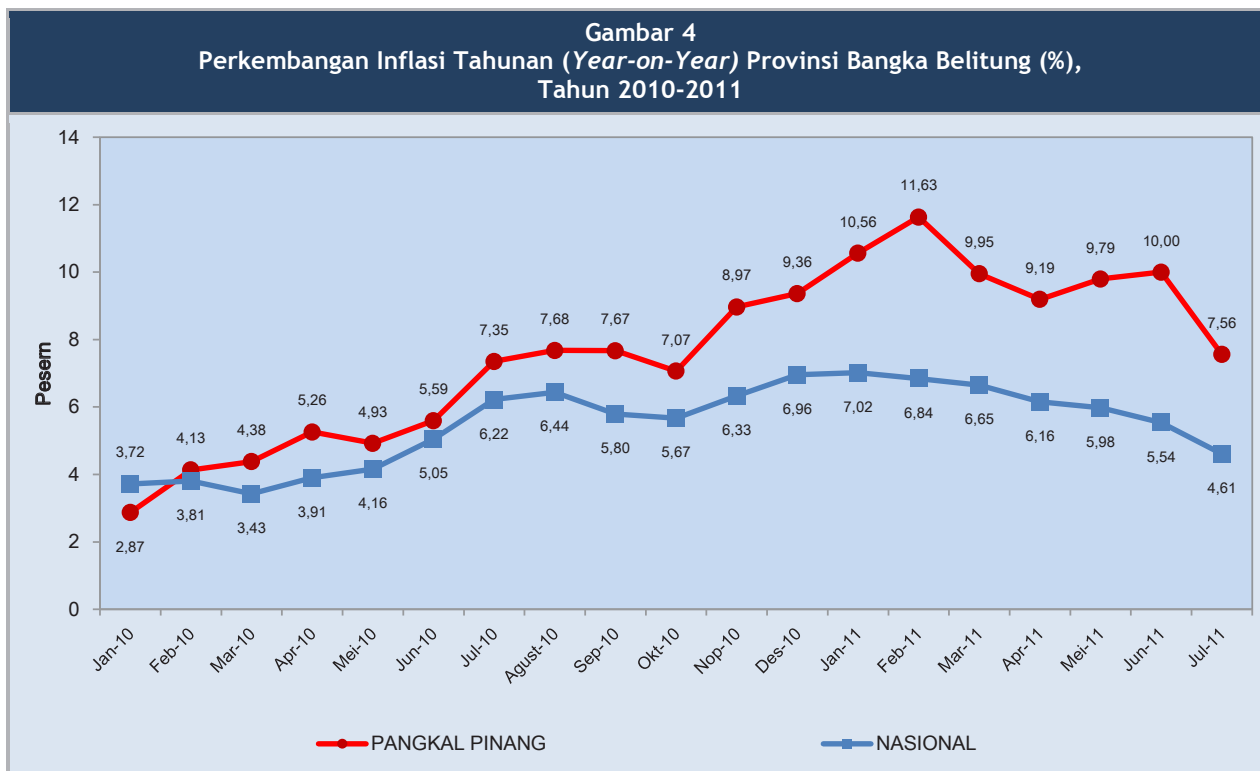
LAPANGAN USAHA	Distribusi PDRB (ADHK 2000)			Distribusi Tenaga Kerja		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Pertanian	22,54	22,54	22,69	33,23	31,28	32,72
Pertambangan	15,04	14,72	14,15	21,93	20,76	20,00
Industri	22,35	22,17	21,62	4,82	4,94	4,47
Listrik, gas, dan air Bersih	0,53	0,55	0,67	0,20	0,22	0,13
Bangunan	6,23	6,55	6,77	5,79	4,92	4,45
Perdagangan	19,64	19,30	19,37	18,31	18,97	21,48
Angkutan dan pergudangan	3,54	3,57	3,74	3,64	3,09	2,58
Keuangan dan jasa perusahaan	3,37	3,55	3,66	0,65	1,34	0,93
Jasa kemasyarakatan	6,75	7,06	7,33	11,45	14,49	13,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

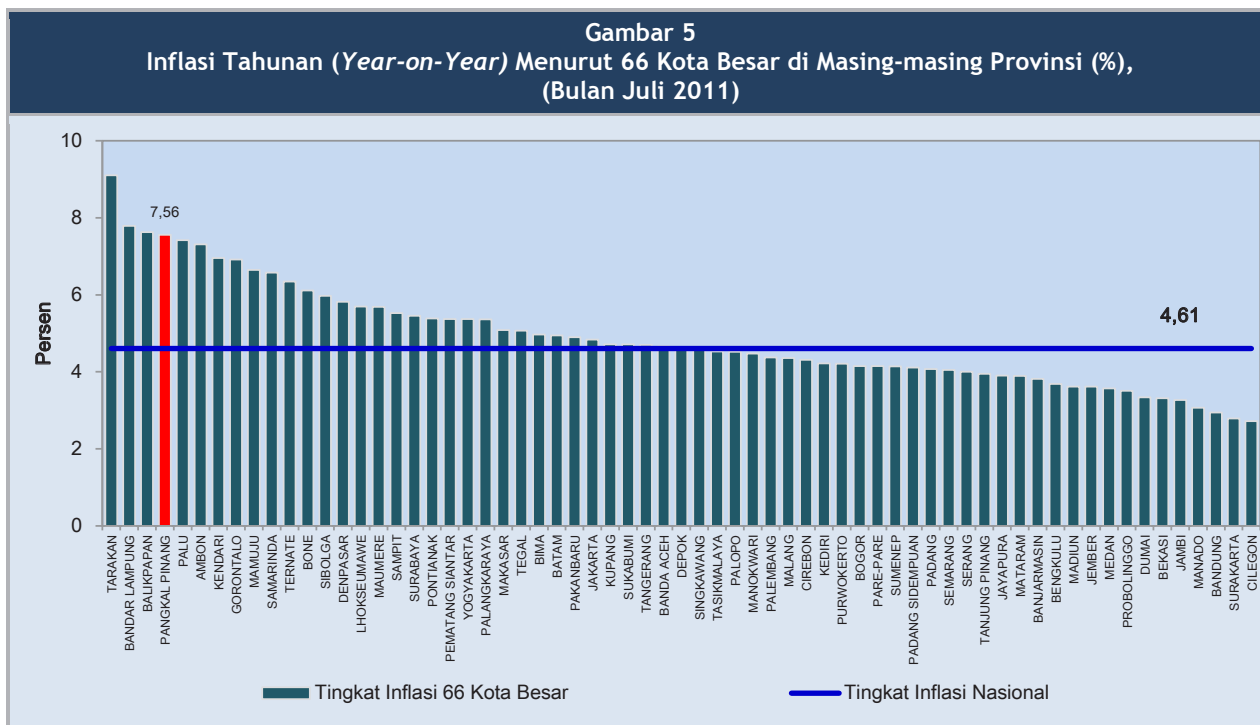


Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS 2011

INFLASI

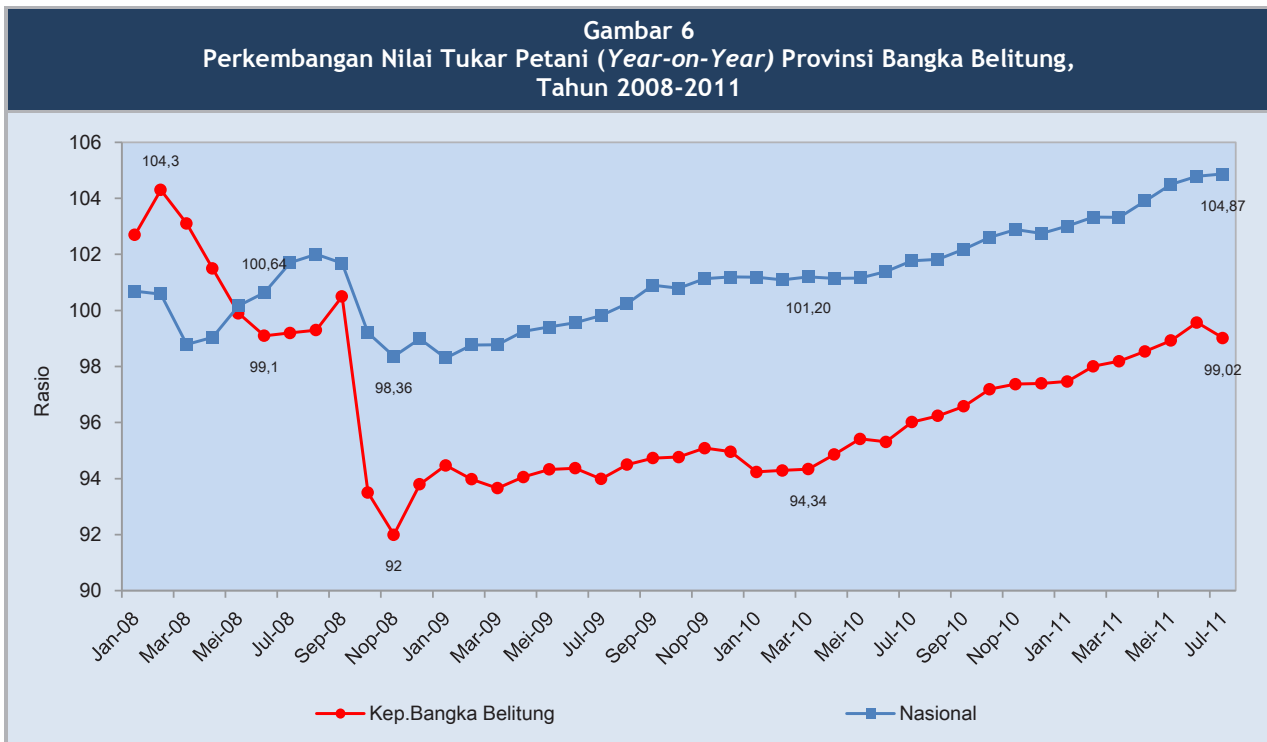


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

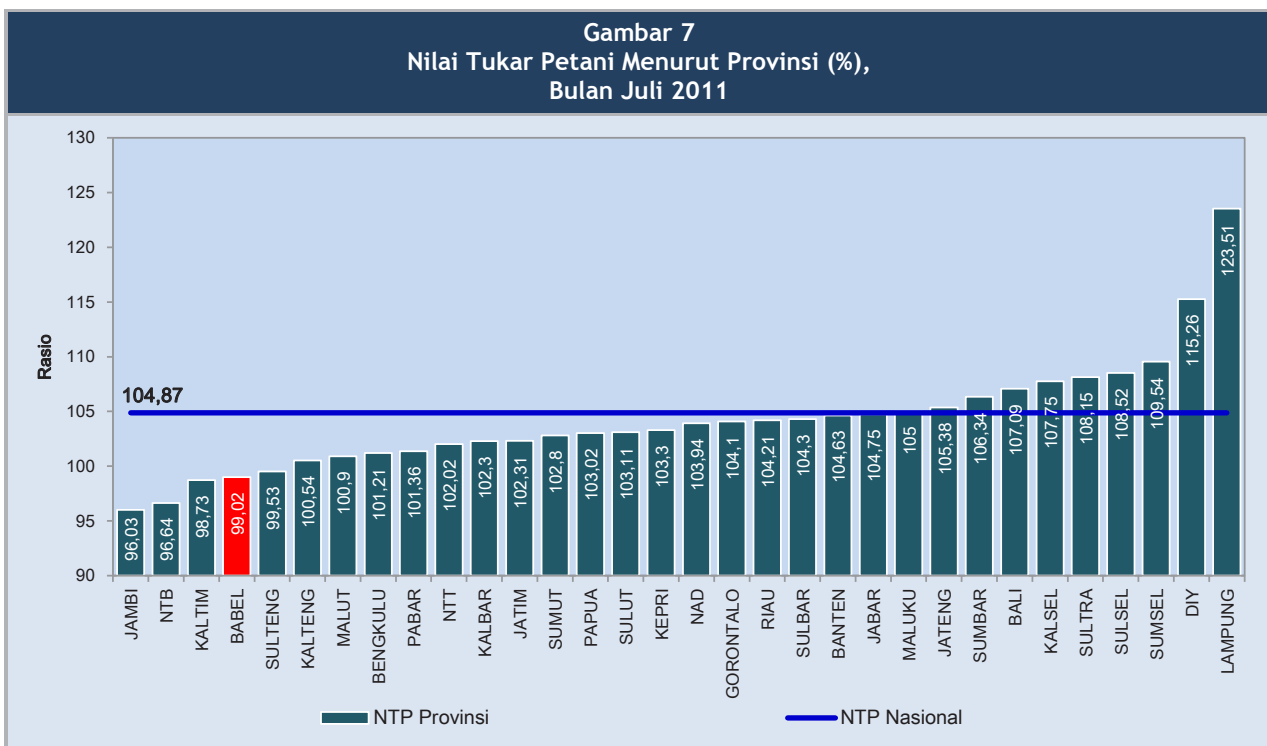


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

NILAI TUKAR PETANI

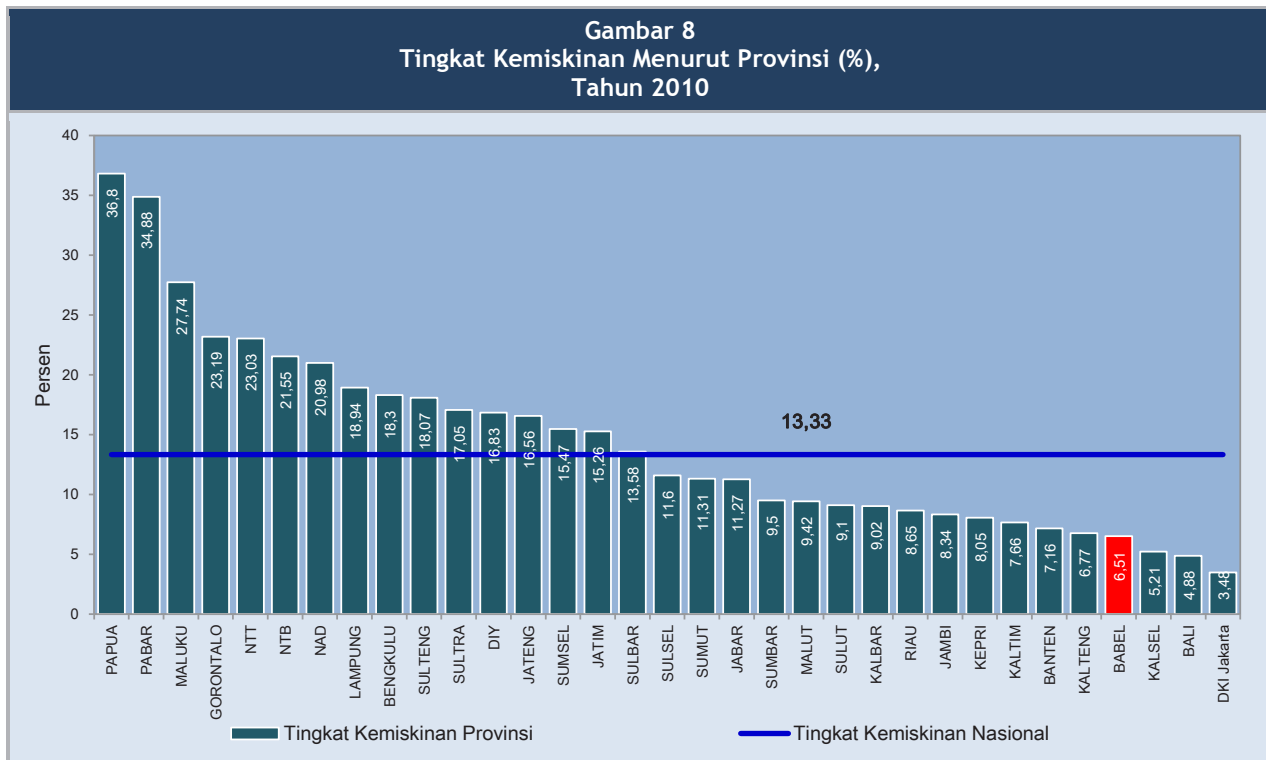


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

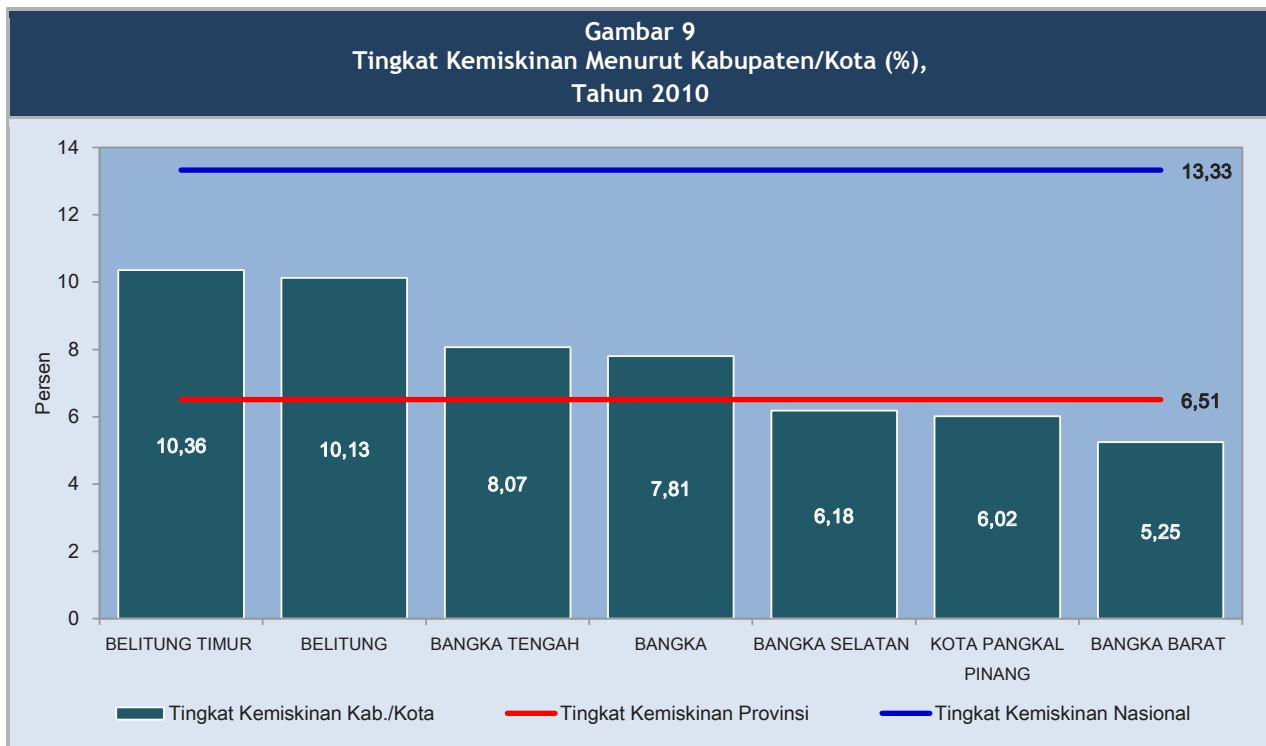


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

TINGKAT KEMISKINAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

INDIKATOR KEMISKINAN

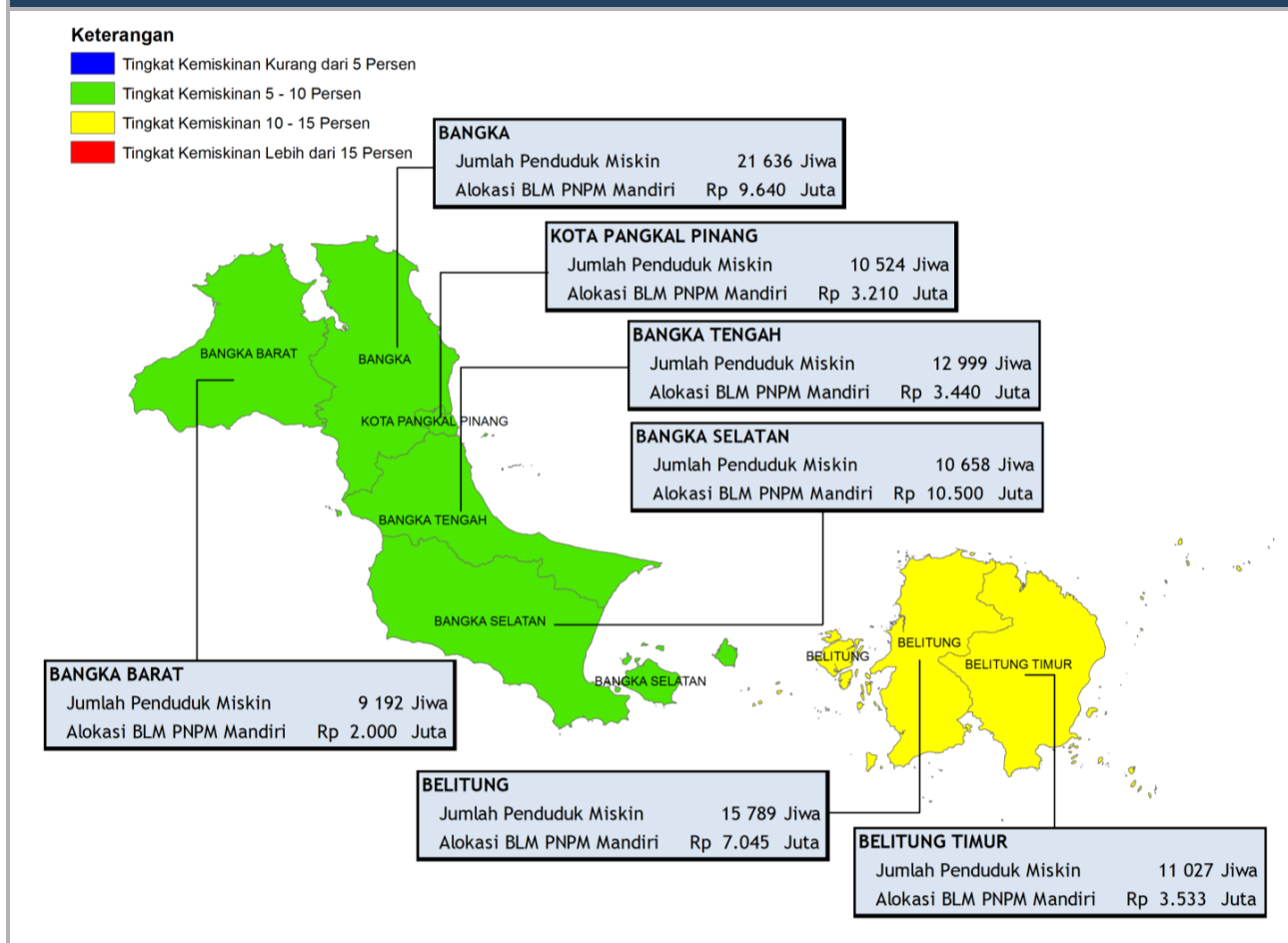
Tabel 4.
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Presentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
BANGKA	254 400	280 069	7,61	7,81	19 006	21 636
BELITUNG	334 165	367 883	9,78	10,13	12 436	15 789
BANGKA BARAT	246 853	271 761	5,22	5,25	7 566	9 192
BANGKA TENGAH	311 419	342 841	7,84	8,07	10 387	12 999
BANGKA SELATAN	249 001	274 125	6,04	6,18	8 929	10 658
BELITUNG TIMUR	305 974	336 847	11,07	10,36	9 259	11 027
KOTA PANGKAL PINANG	303 694	334 337	5,79	6,02	8 430	10 524
BANGKA BELITUNG	280 862	310 197	7,37	7,51	76 013	91 826
INDONESIA	200 262	211 726	14,15	13,33	32.530.000	31.023.390

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan hasil Susenas Kor Juli 2010)

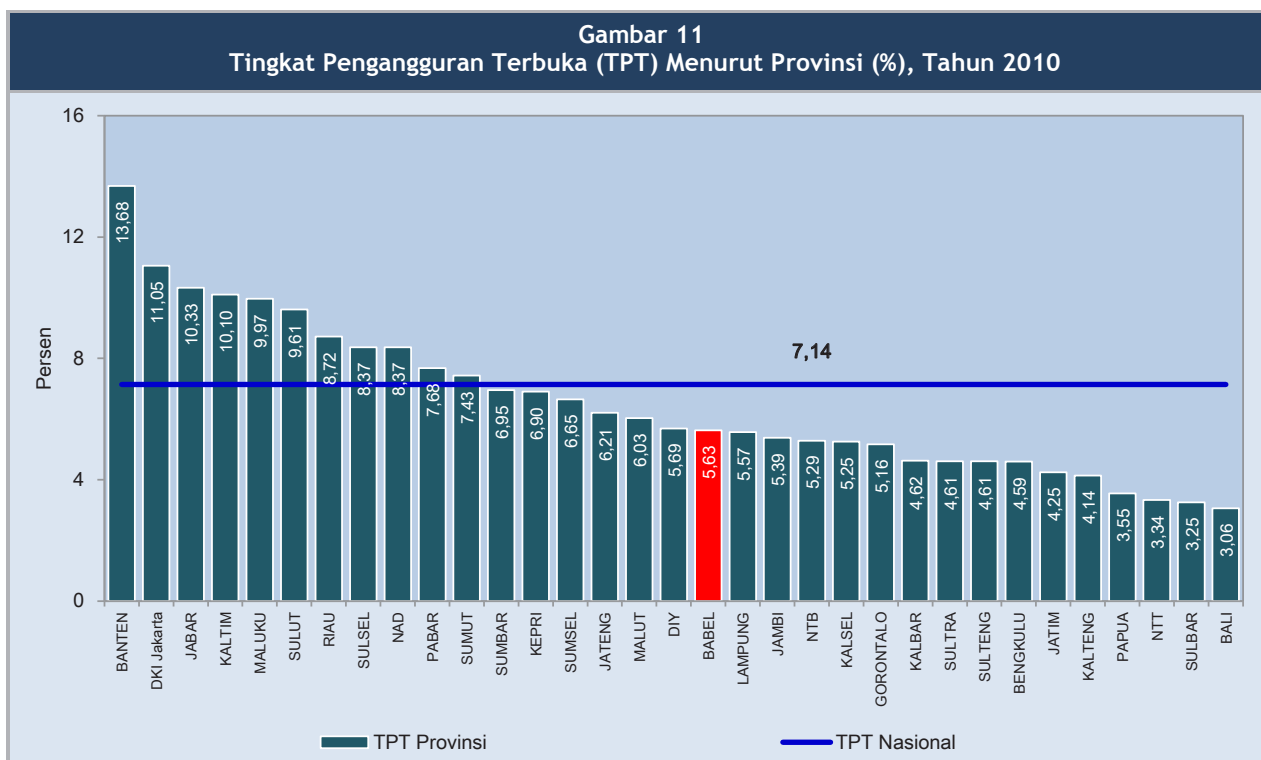
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Gambar 10
Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010,
Alokasi BLM PNPB Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota

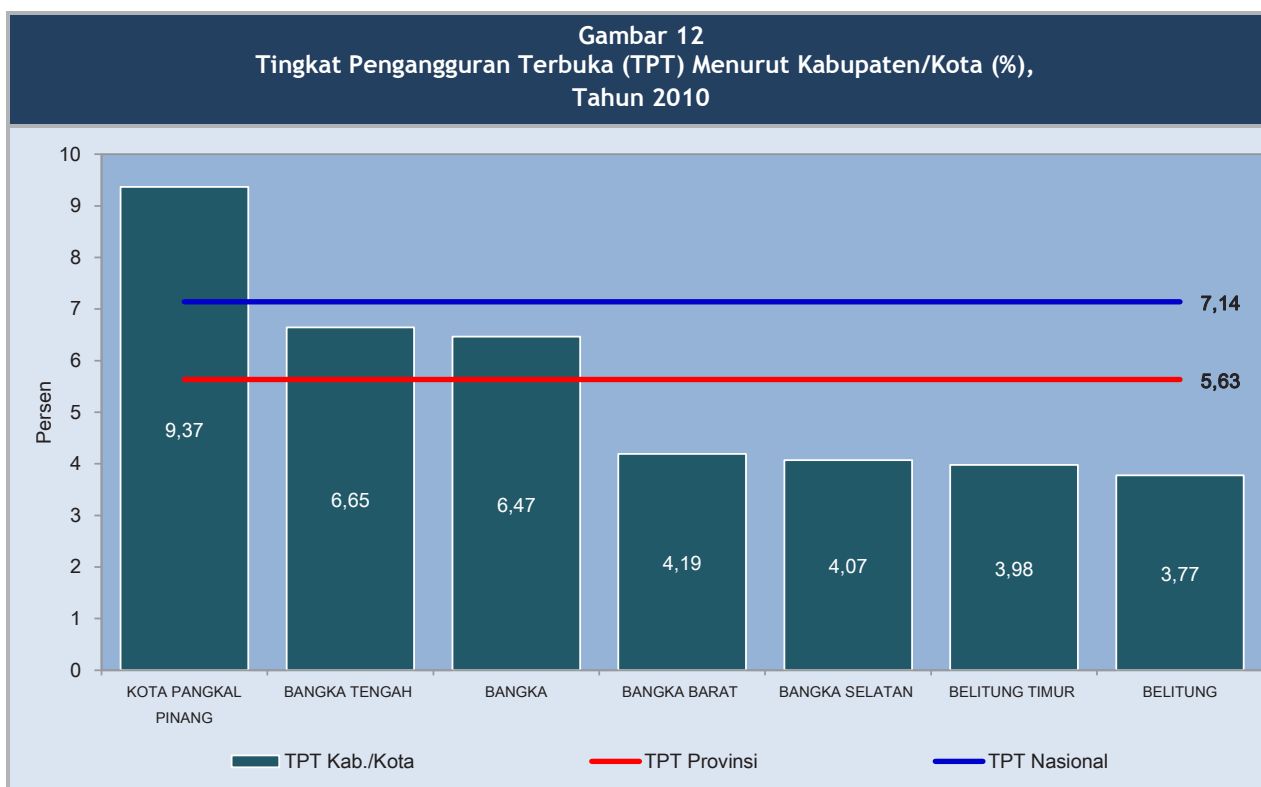


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN

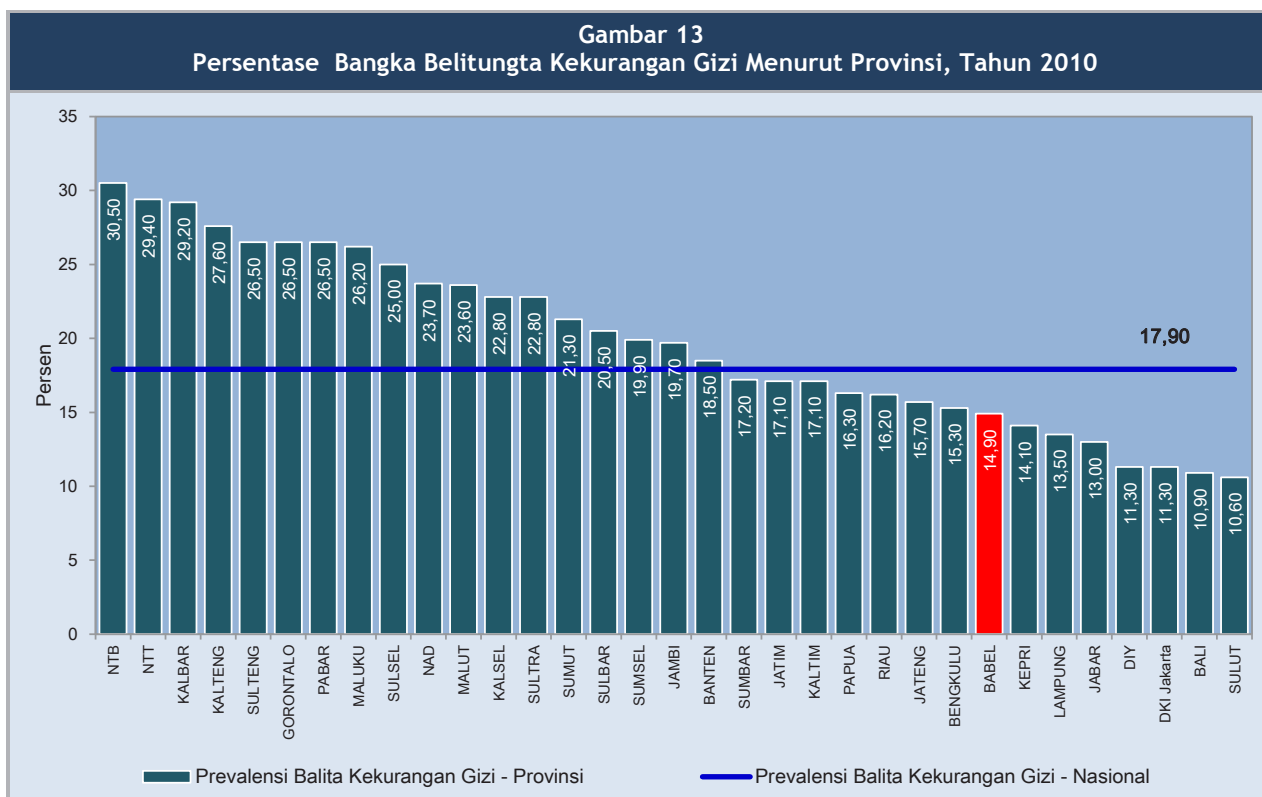
Tabel 5.
Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010

Daerah	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 14 Jam Seminggu		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 35 Jam Seminggu		Pekerja di Sektor Informal	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
BANGKA	63,75	65,17	5,28	3,57	36,71	38,69	55,40	56,49
BELITUNG	67,78	68,58	4,70	3,99	24,86	23,32	44,71	42,96
BANGKA BARAT	63,86	71,06	4,36	3,91	28,85	40,65	59,58	58,40
BANGKA TENGAH	66,28	67,20	3,84	2,46	25,43	30,20	62,49	52,93
BANGKA SELATAN	68,23	66,53	4,37	2,30	34,67	27,63	66,55	64,86
BELITUNG TIMUR	61,03	62,03	2,84	1,89	22,15	20,34	48,46	47,32
KOTA PANGKAL PINANG	64,40	64,47	2,67	2,68	20,52	15,75	39,52	32,67
BANGKA BELITUNG	65,06	66,53	4,21	3,09	28,87	29,66	54,09	51,78
NASIONAL	67,23	67,72	4,29	4,11	30,10	30,75	61,56	58,96

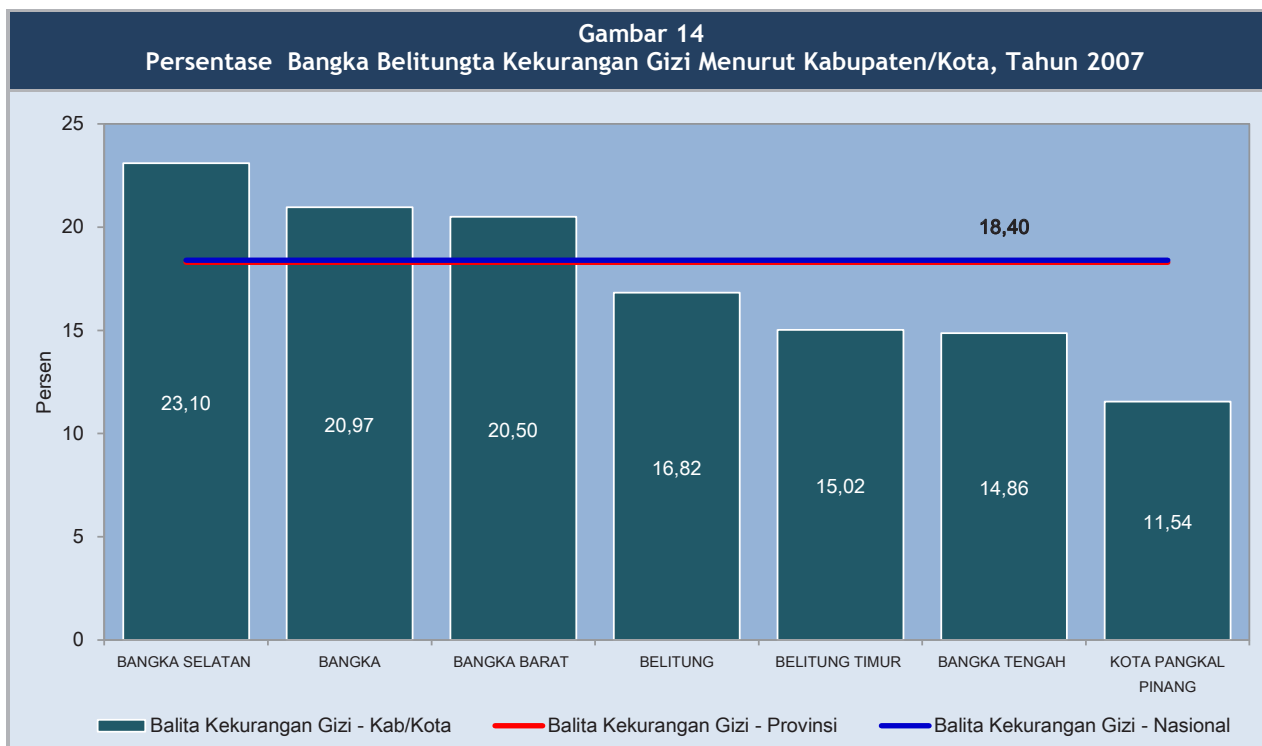
Keterangan: Daerah Pemekaran, Data Belum Tersedia.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

BIDANG KESEHATAN

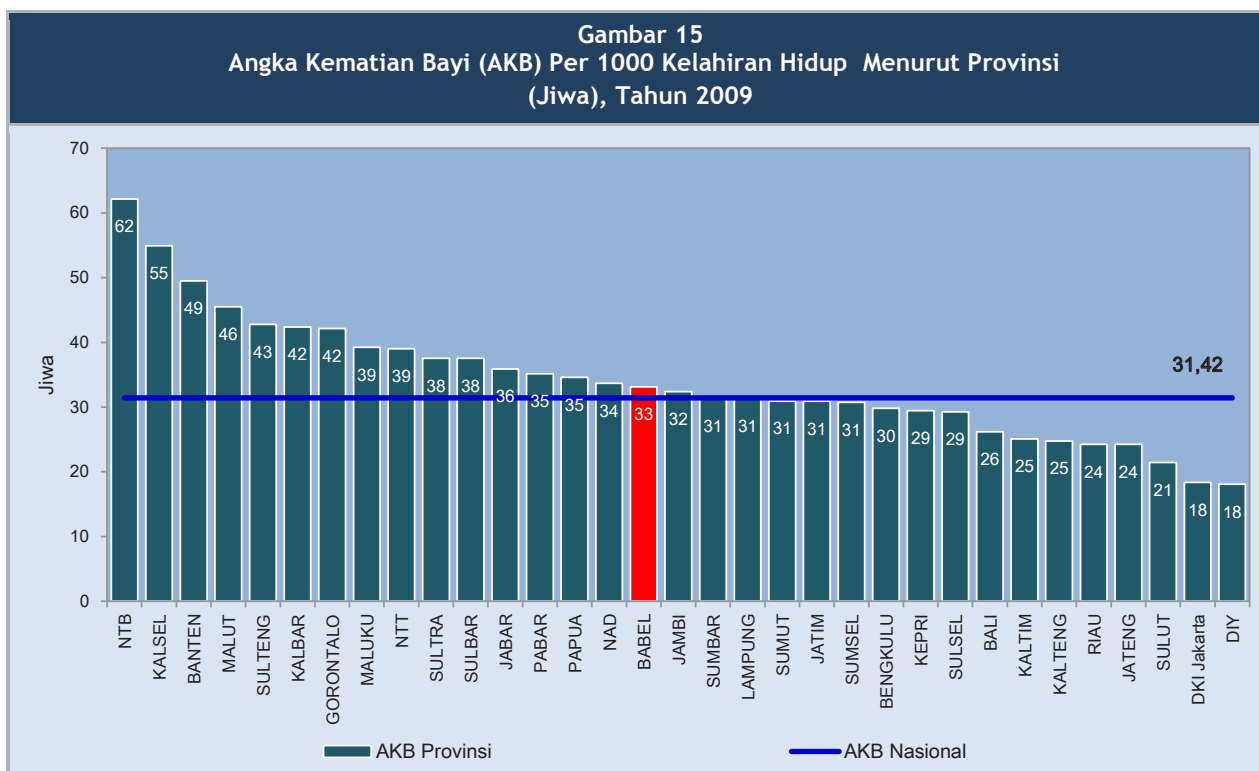


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2010

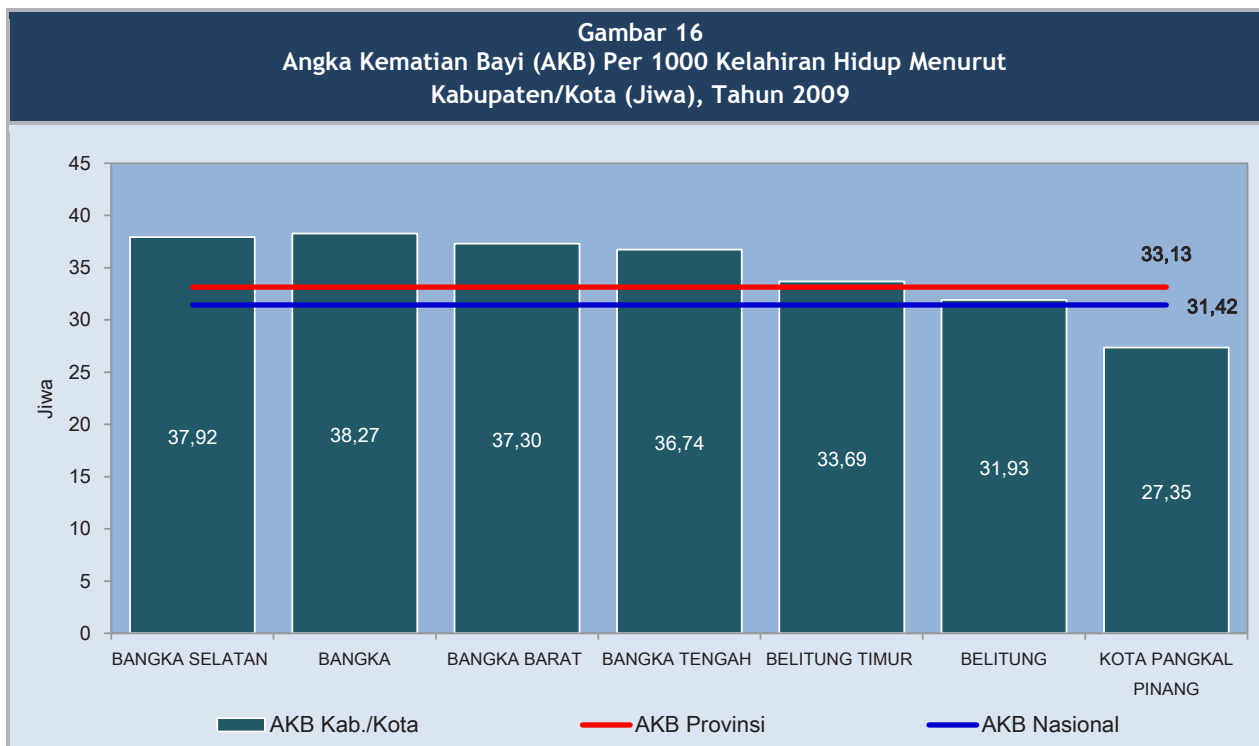


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2007

BIDANG KESEHATAN

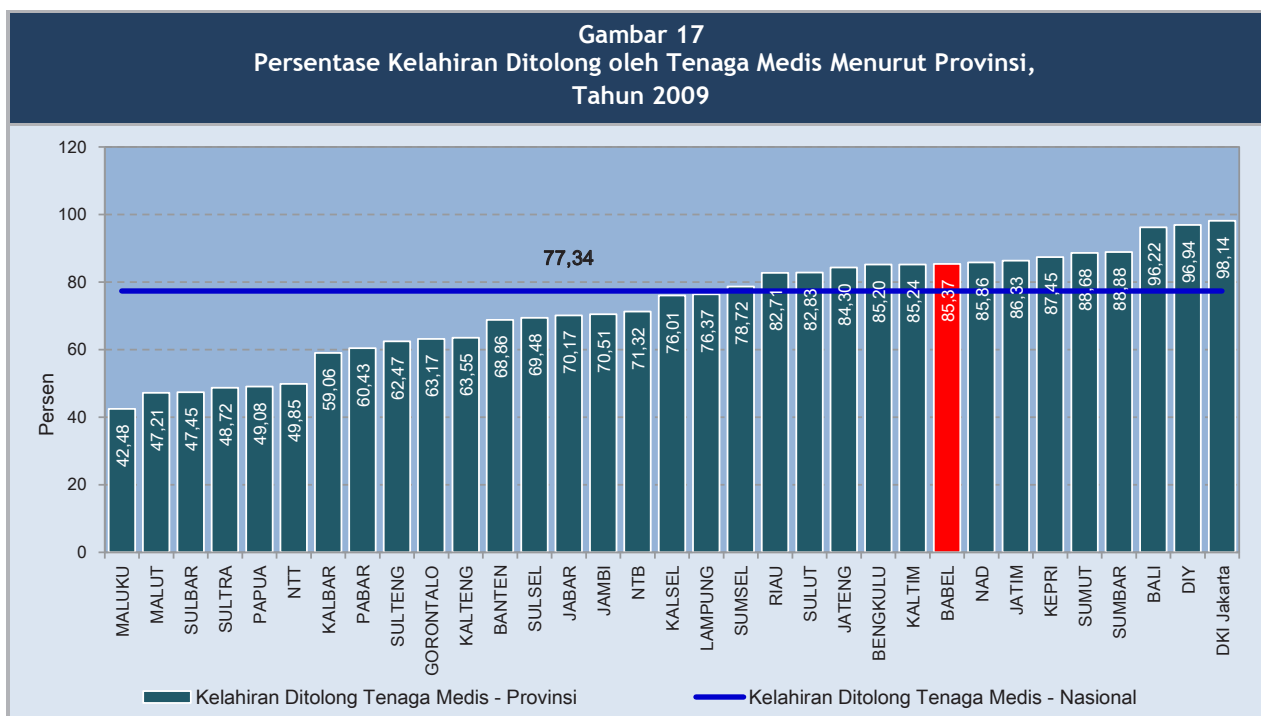


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

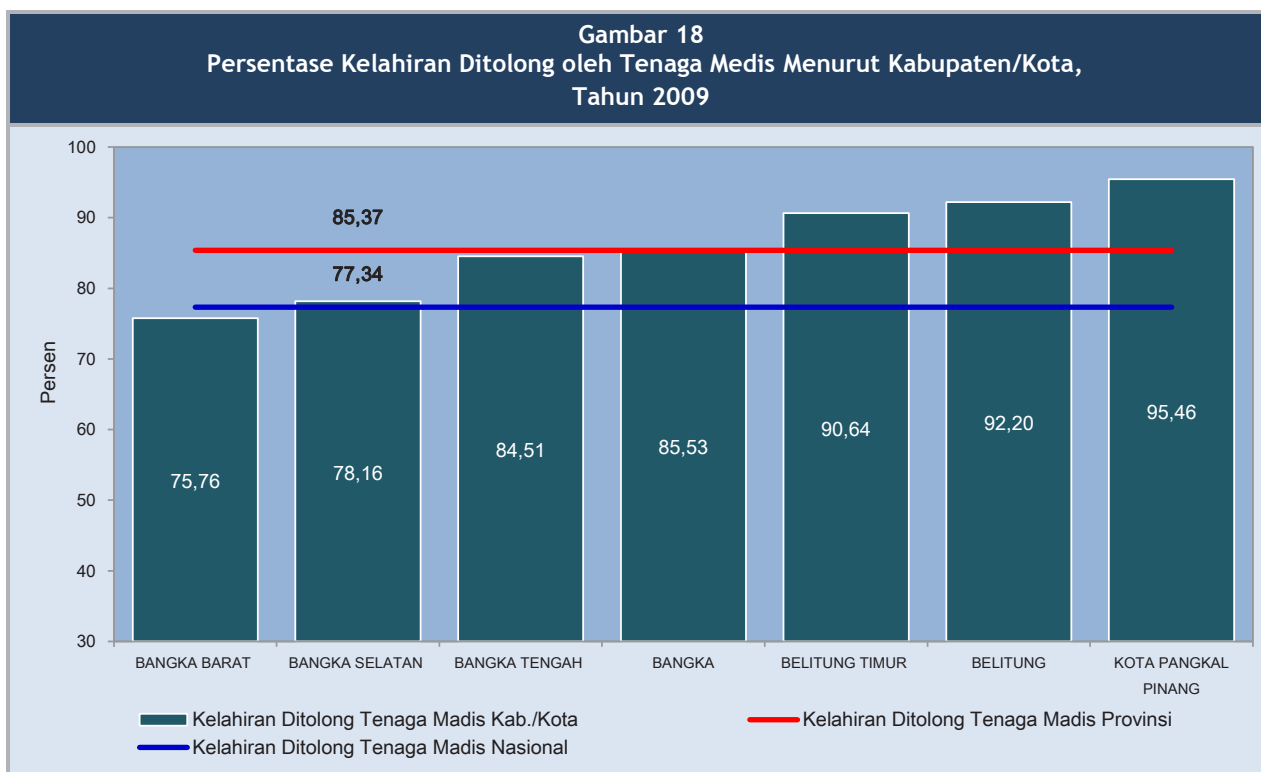


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

BIDANG KESEHATAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



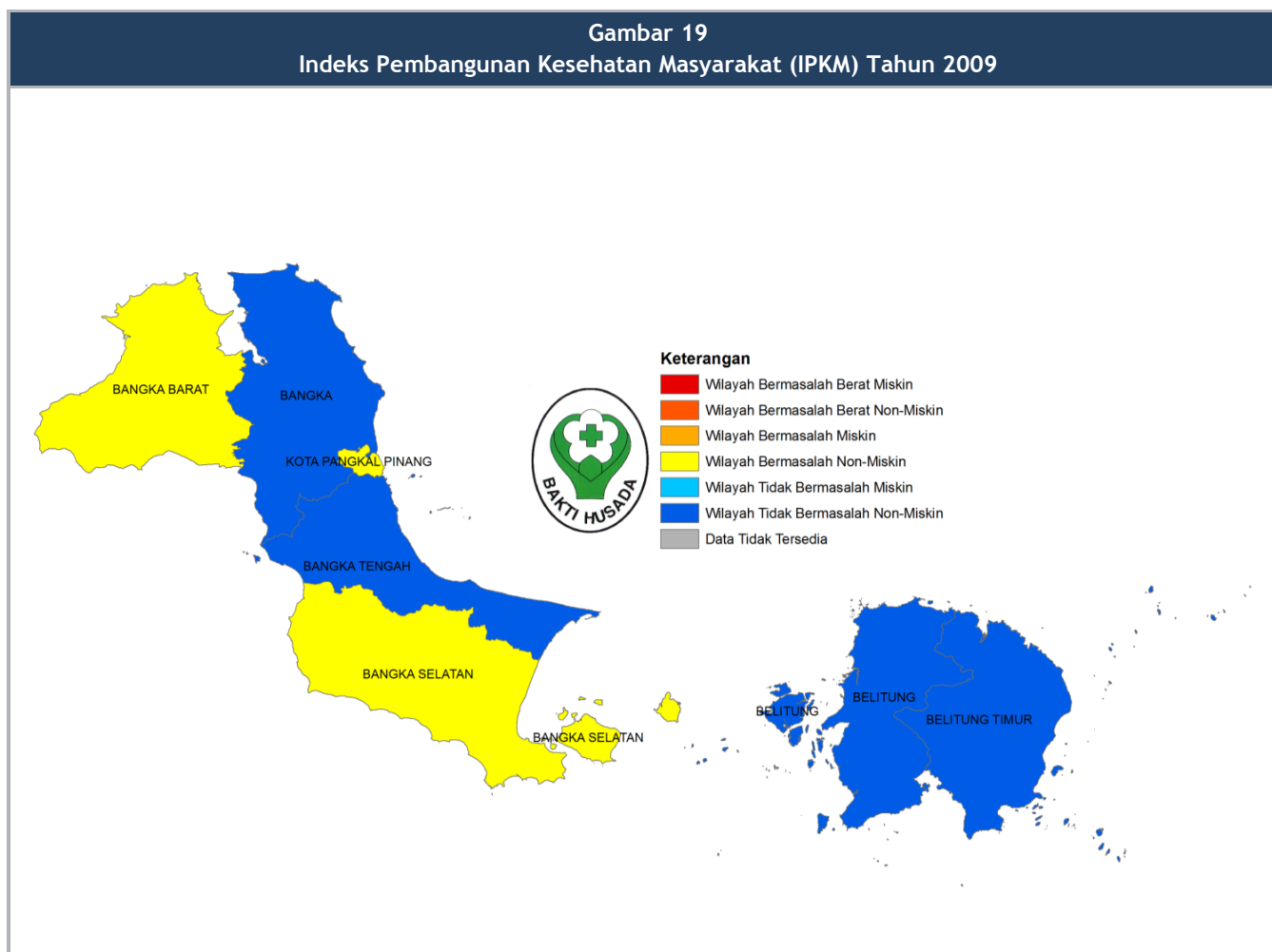
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Tabel 6.
Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Penduduk dengan keluhan kesehatan	Angka Morbiditas	Rata-rata Lama Sakit	Penduduk yg Melakukan Pengobatan Sendiri
	(%)	(%)	(%)	(%)
BANGKA	44,08	24,23	5,31	61,40
BELITUNG	46,47	20,80	5,69	70,49
BANGKA BARAT	43,59	25,06	6,23	71,80
BANGKA TENGAH	46,78	27,10	5,83	76,91
BANGKA SELATAN	40,46	28,20	5,78	69,77
BELITUNG TIMUR	39,90	20,17	5,01	73,27
KOTA PANGKAL PINANG	38,57	21,14	5,22	68,60
BANGKA BELITUNG	43,02	24,10	5,61	69,19
INDONESIA	33,68	18,63	5,51	68,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

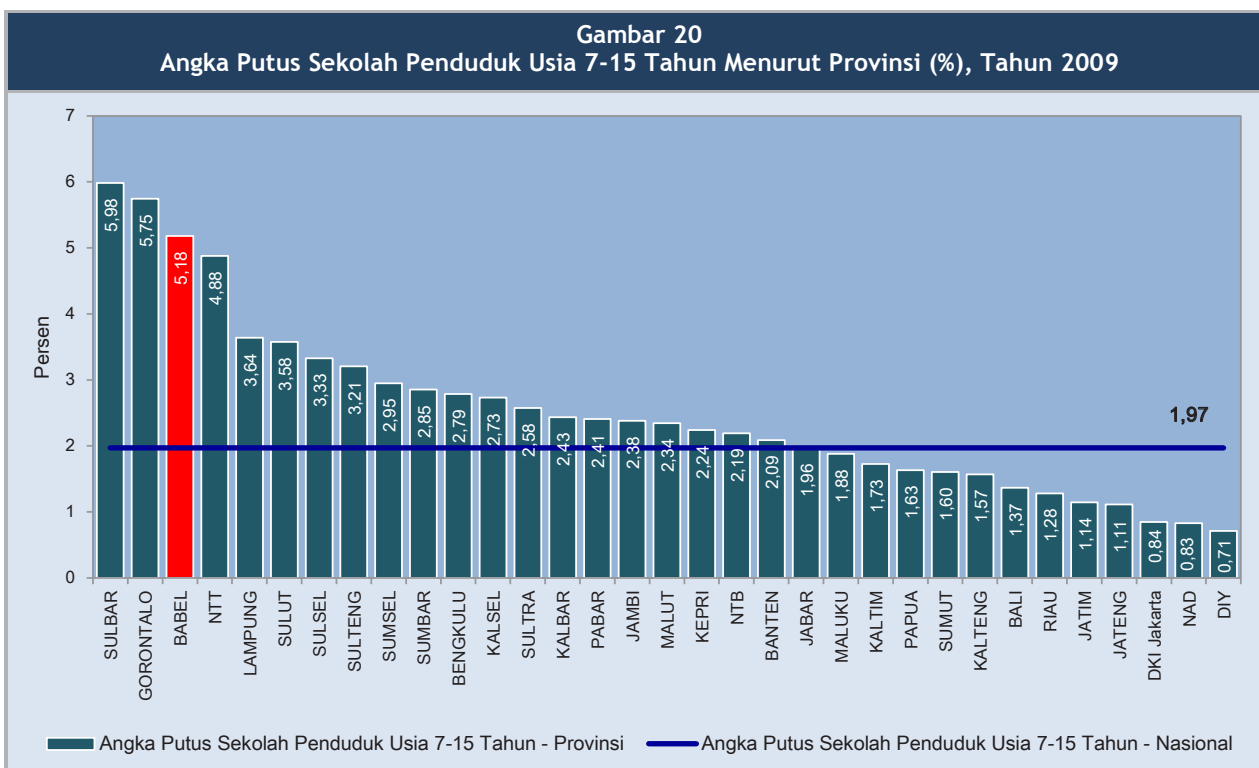
Tabel 7.
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)² Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Kategori Wilayah	IPKM		Keterangan
		Rangking	Nilai	
BANGKA	KaF	182	0,53	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
BELITUNG	KaF	173	0,54	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
BANGKA BARAT	KaD	342	0,44	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
BANGKA TENGAH	KaF	185	0,53	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
BANGKA SELATAN	KaD	323	0,45	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
BELITUNG TIMUR	KaF	216	0,51	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
KOTA PANGKAL PINANG	KoD	132	0,57	Kota Bermasalah Non Miskin

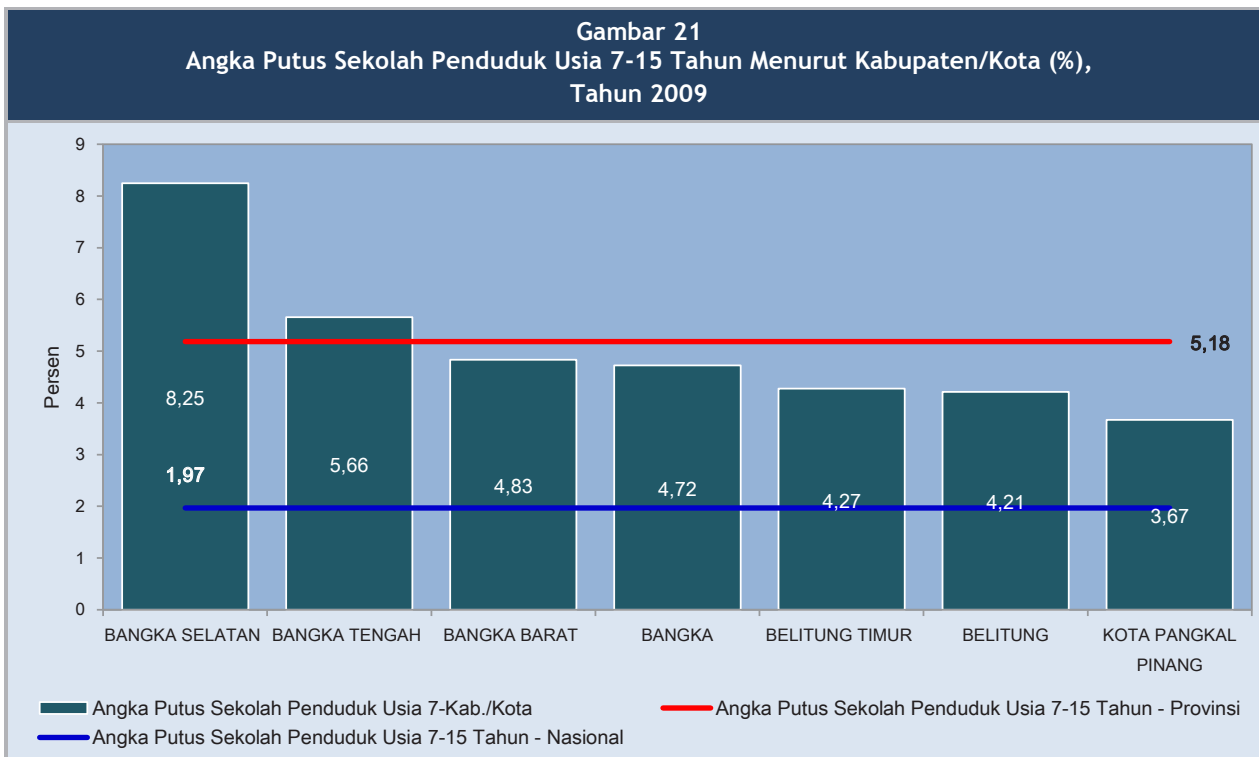
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

² IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan dan dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar); Susenas (Survei Ekonomi Nasional); dan Survei Podes (Potensi Desa). IPKM digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan pada bidang kesehatan dan mendukung efektivitas intervensi pada bidang kesehatan.

BIDANG PENDIDIKAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

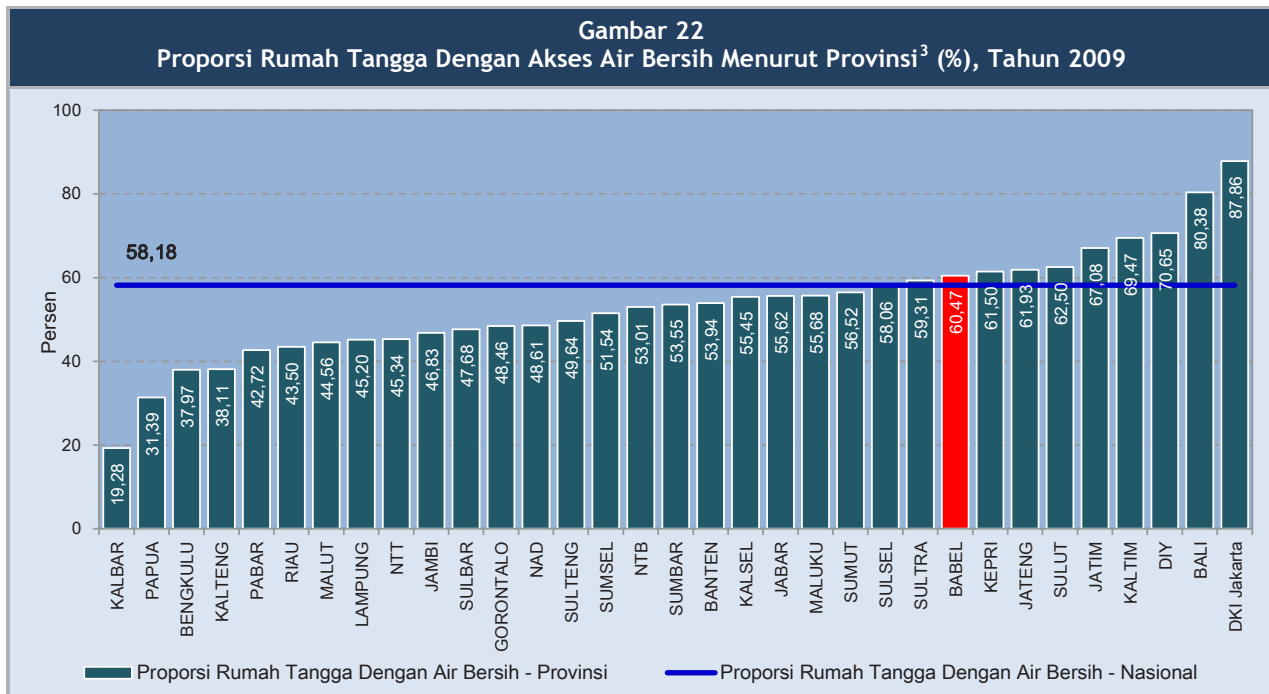
BIDANG PENDIDIKAN

Tabel 8.
Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

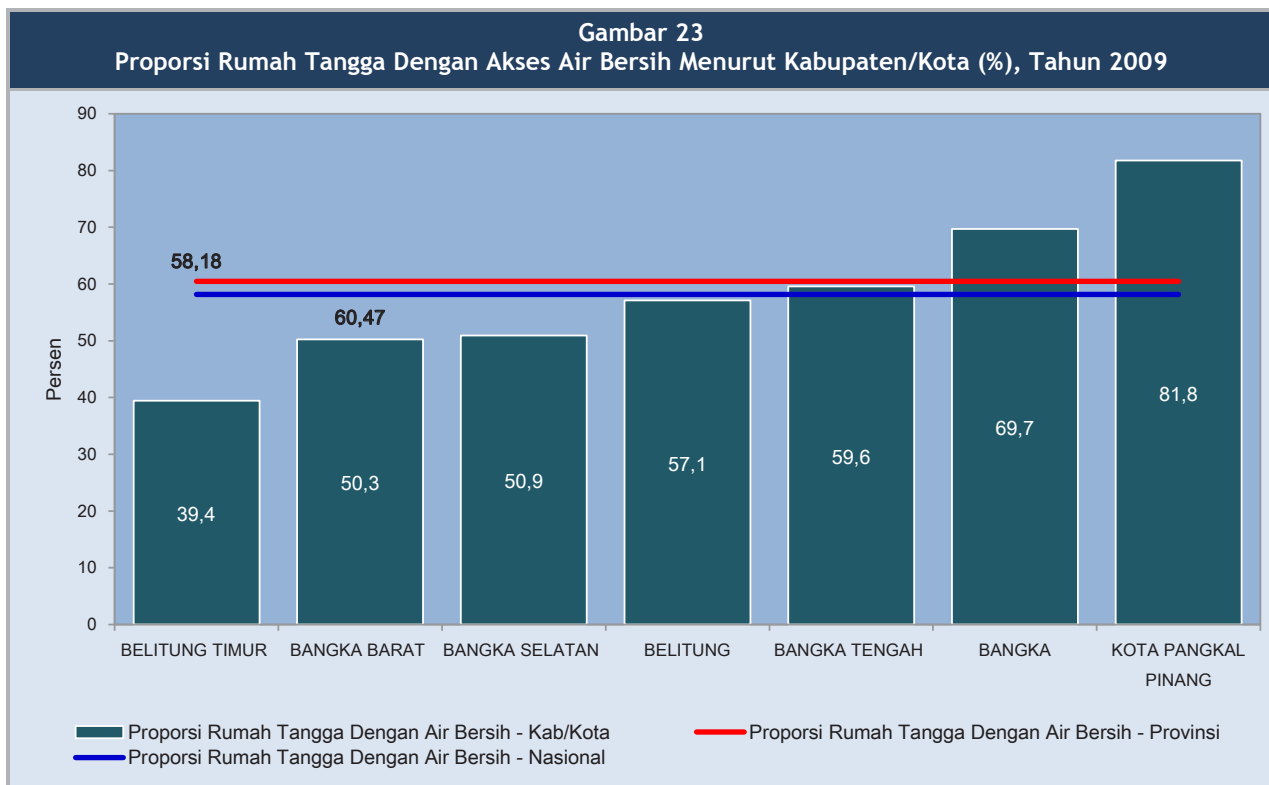
Daerah	Angka Partisipasi Pendidikan					
	Sekolah Dasar (SD/MI)		Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)		Sekolah Menengah Atas (SMAMA/SMK)	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
BANGKA	119,63	97,22	57,30	52,68	61,08	44,75
BELITUNG	114,90	87,01	72,37	46,57	85,62	49,57
BANGKA BARAT	111,91	87,78	79,20	54,04	61,60	40,48
BANGKA TENGAH	112,65	93,20	77,51	57,24	41,50	30,78
BANGKA SELATAN	111,17	94,20	69,62	54,96	31,38	22,49
BELITUNG TIMUR	110,00	91,54	75,29	52,84	62,15	34,46
KOTA PANGKAL PINANG	111,05	91,74	75,30	52,29	79,72	43,79
BANGKA BELITUNG	113,79	92,52	71,26	53,10	58,56	38,13
INDONESIA	110,42	94,37	81,25	67,43	62,55	45,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

AKSES TERHADAP AIR BERSIH



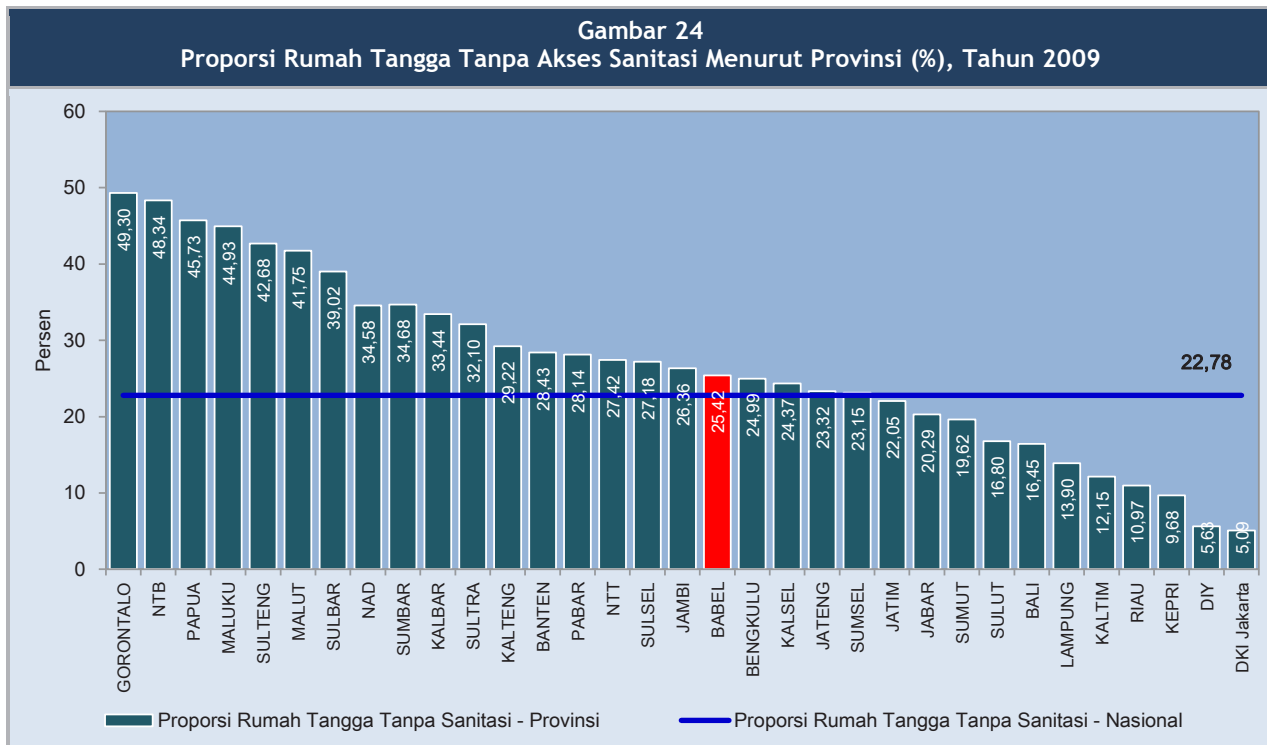
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



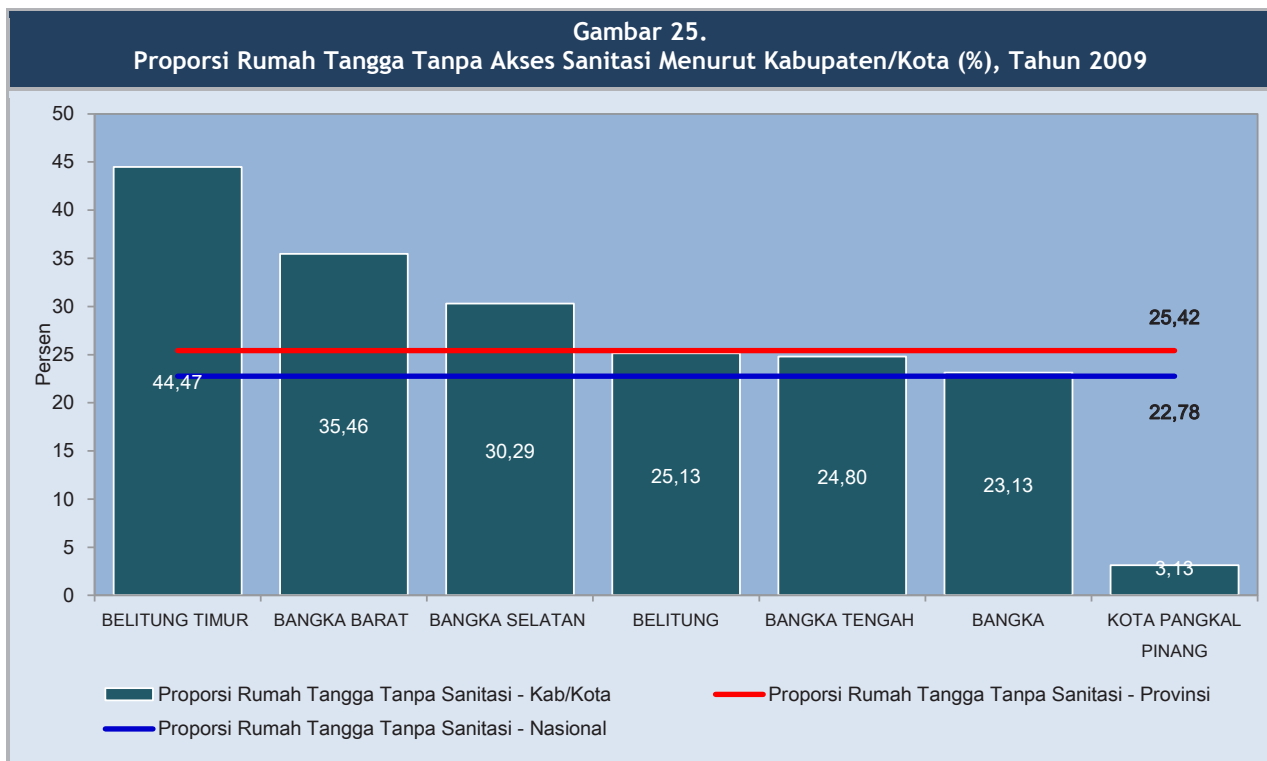
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

³ Akses terhadap air bersih dengan kontrol jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat

AKSES TERHADAP SANITASI

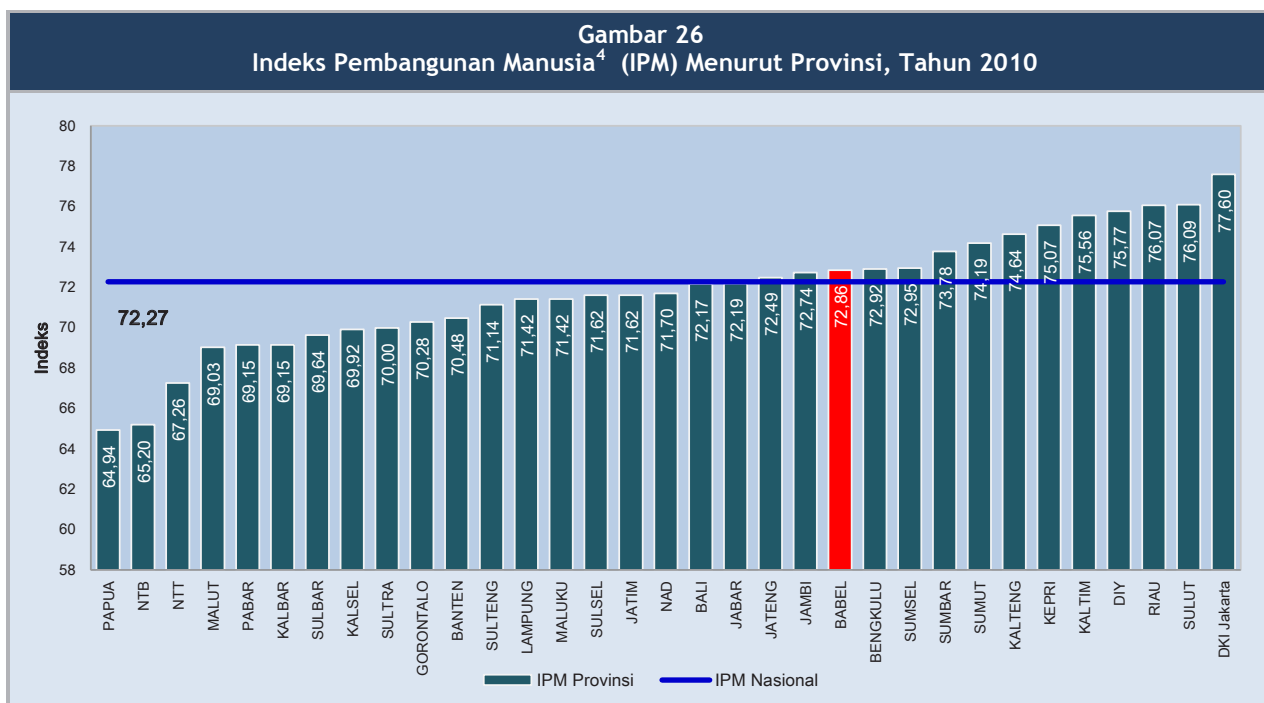


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

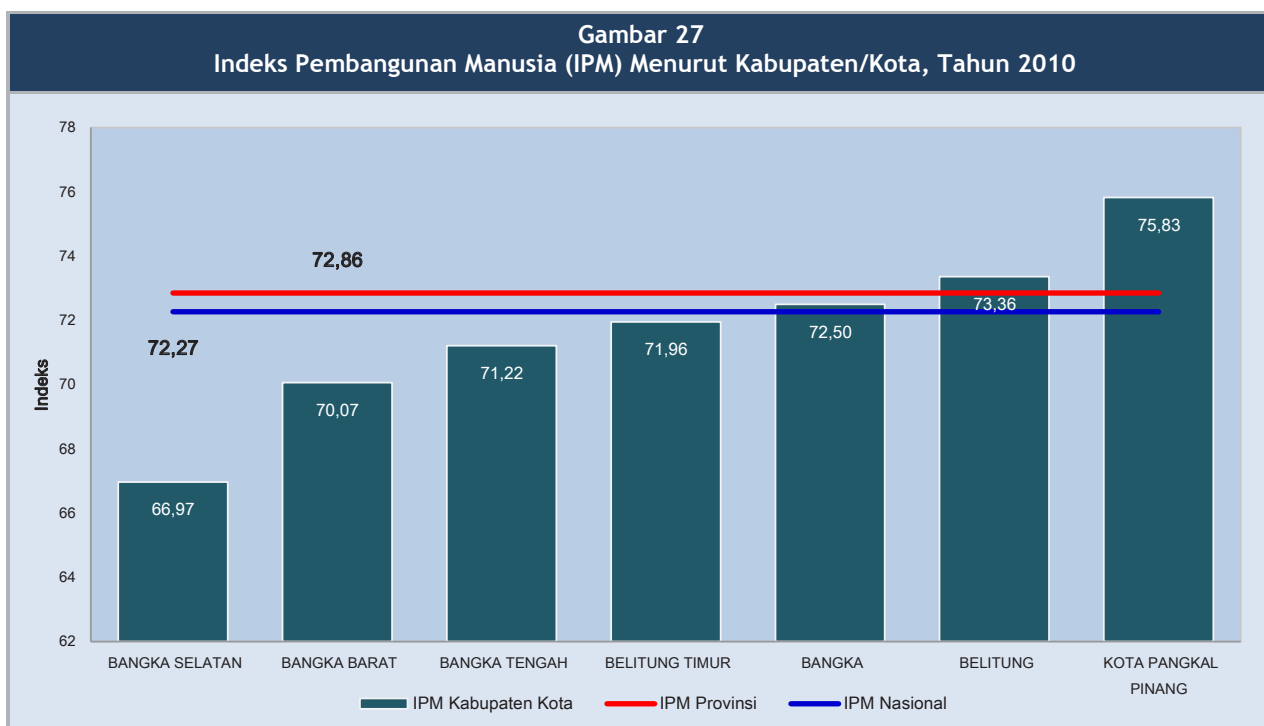


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

⁴ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran kesejahteraan dengan membandingkan antara harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Ukuran kesejahteraan tersebut diperkenalkan dan diterbitkan oleh PBB dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) sejak tahun 1990.

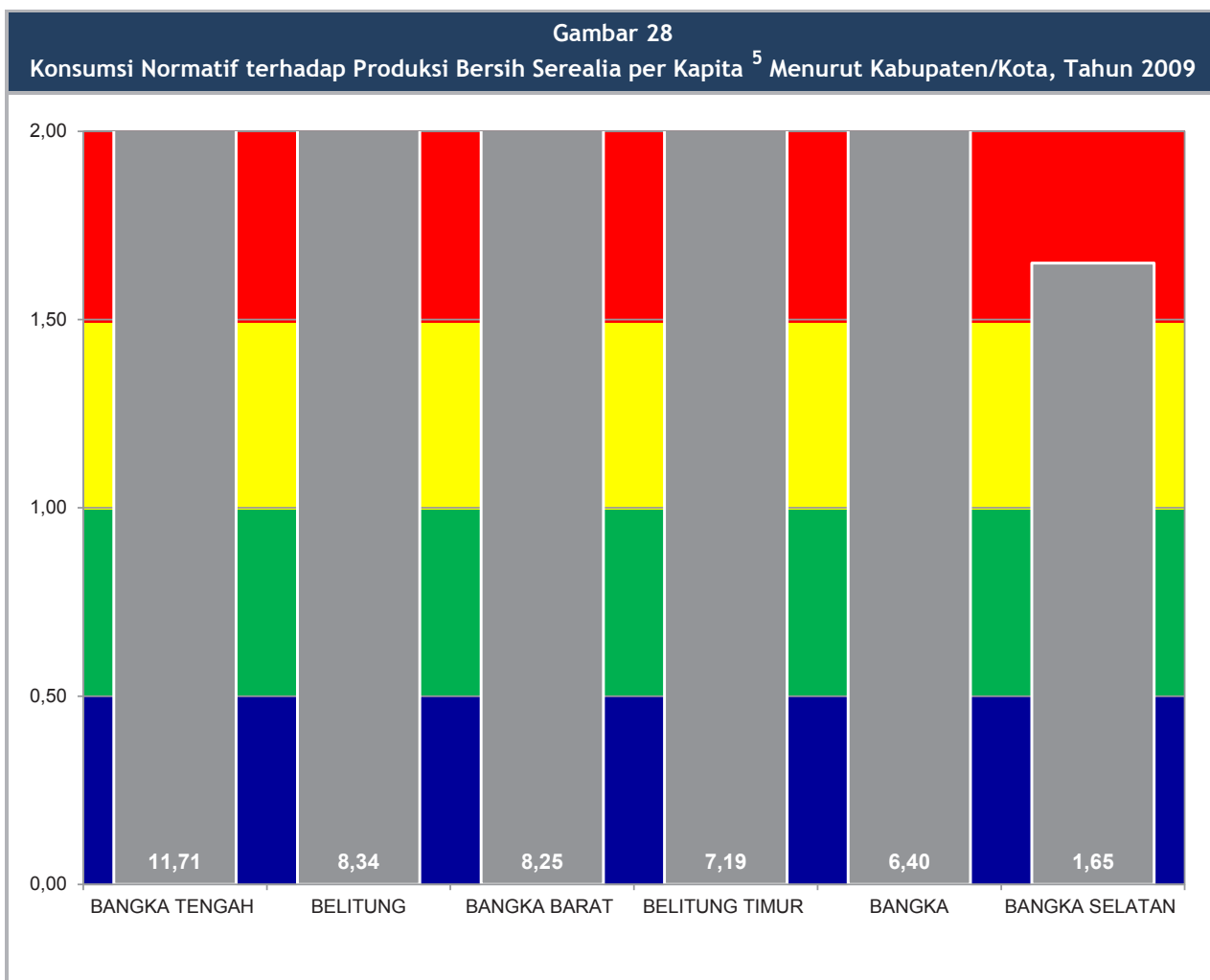
KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 9.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota,
Tahun 2009 dan 2010

Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		IPM	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
BANGKA	67,43	67,64	96,15	96,31	7,46	7,64	641,08	642,34	72,12	72,50
BELITUNG	69,08	69,17	96,42	96,51	7,79	7,81	636,88	640,31	73,01	73,36
BANGKA BARAT	67,66	67,78	92,85	92,86	6,72	6,87	625,64	627,09	69,77	70,07
BANGKA TENGAH	67,79	67,92	95,80	95,90	6,75	6,86	630,49	632,28	70,90	71,22
BANGKA SELATAN	67,51	67,72	92,70	93,62	5,97	5,99	591,87	593,57	66,50	66,97
BELITUNG TIMUR	68,60	68,83	96,63	96,69	7,47	7,48	624,98	627,09	71,64	71,96
KOTA PANGKAL PINANG	70,32	70,43	98,18	98,18	9,14	9,50	640,71	642,10	75,39	75,83
BANGKA BELITUNG	68,75	68,90	95,63	95,69	7,41	7,45	639,10	641,51	72,55	72,86
INDONESIA	69,21	69,43	92,58	92,91	7,72	7,92	631,46	633,64	71,76	72,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

KETAHANAN PANGAN



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, 2009 dan Bangka Belitung Dalam Angka (BPS), 2010.

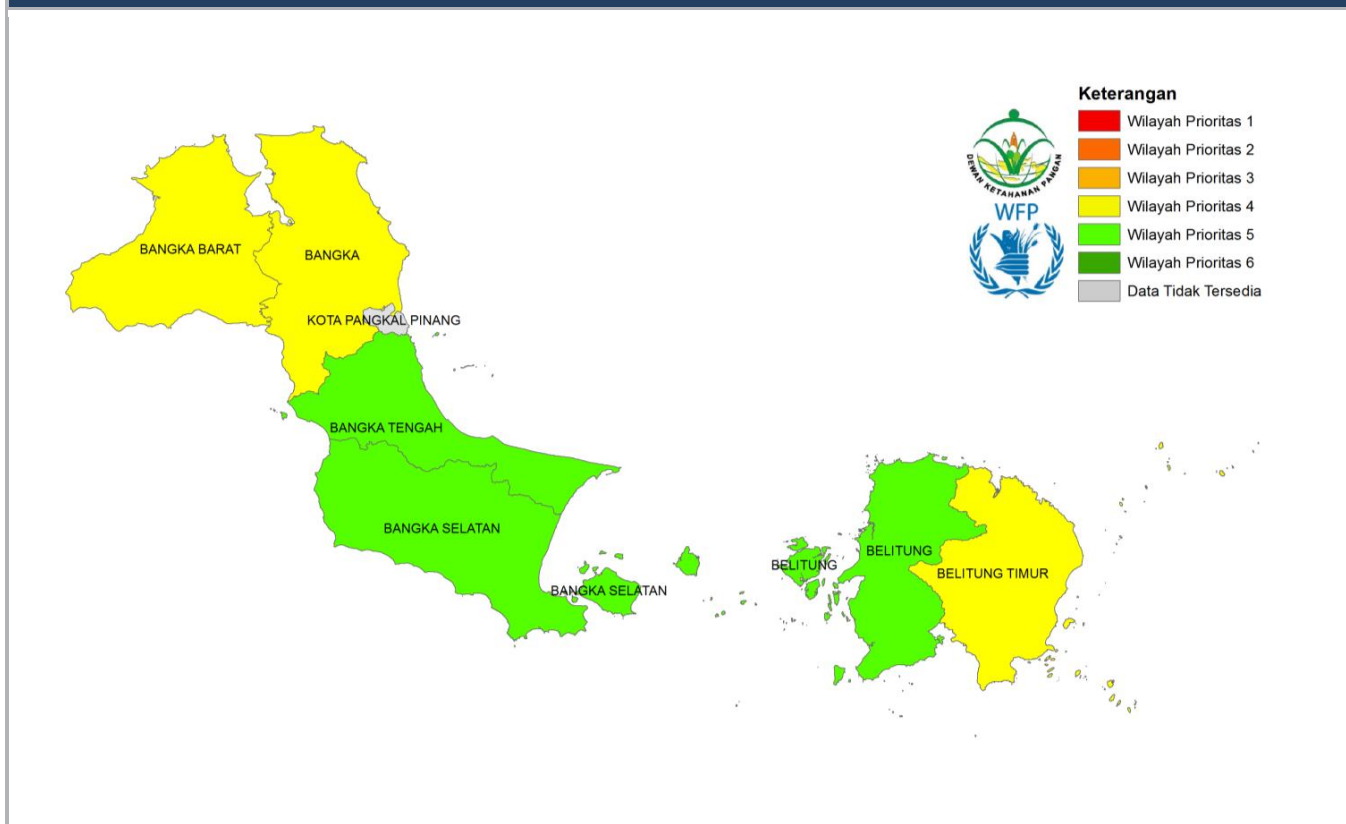
Keterangan:

- >1,5 Defisit Tinggi
- 1 – 1,5 Defisit Sedang
- 0,5 – 1 Surplus Rendah
- 0 – 0,5 Surplus Tinggi
- 0 Data Tidak Tersedia

⁵ Merupakan salah satu ukuran ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan Kota dan termasuk dalam Peta Kerawanan Pangan Indonesia (Food Insecurity Atlas-FIA) diperkenalkan oleh DKP, Badan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) pada tahun 2005.

KETAHANAN PANGAN

Gambar 29
Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan⁶ Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009



Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009

⁶ Pada tahun 2009, cakupan diperluas dari 30 provinsi di 265 kabupaten menjadi 32 provinsi dan 346 kabupaten serta merupakan konsolidasi berbagai aspek yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan serta gizi dan kesehatan yang dipublikasikan dengan nama "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)"

Tabel 10.
Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Ketersediaan Pangan		Akses Pangan			Akses terhadap Kesehatan dan Gizi					Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)
	Produksi Bersih Sereal- Kab./Kota (Kg/kapita/ hari)	Rasio Konsumsi Normatif- Kab./Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Non Elektrifikasi	Desa tanpa Akses ke Jalan (%)	Angka Buta Huruf Perempuan (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan (%)	Penduduk tanpa akses pada air bersih* (%)	
	2009	2009	2009	2008	2008	2009	2009	2007	2008	2009	
BANGKA	47	6,4	7,61	10,24	0,00	5,40	67,43	29,8	13,04	30,30	337,3
BELITUNG	36	8,34	9,78	14,55	2,38	6,53	69,08	21,3	7,14	42,88	237,3
BANGKA BARAT	36	8,25	5,22	1,13	0,00	9,25	67,66	25,5	35,09	49,72	600,5
BANGKA TENGAH	26	11,71	7,84	9,27	0,00	8,89	67,79	26,7	15,79	40,42	364,9
BANGKA SELATAN	182	1,65	6,04	31,83	3,77	9,41	67,51	28,3	22,64	49,08	460,4
BELITUNG TIMUR	42	7,19	11,07	21,66	3,33	6,21	68,60	19,8	3,33	60,57	205,5
KOTA PANGKAL PINANG			5,79	3,91	0,00	3,62	70,32	14,6	0,00	18,22	148,7

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011, Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009.

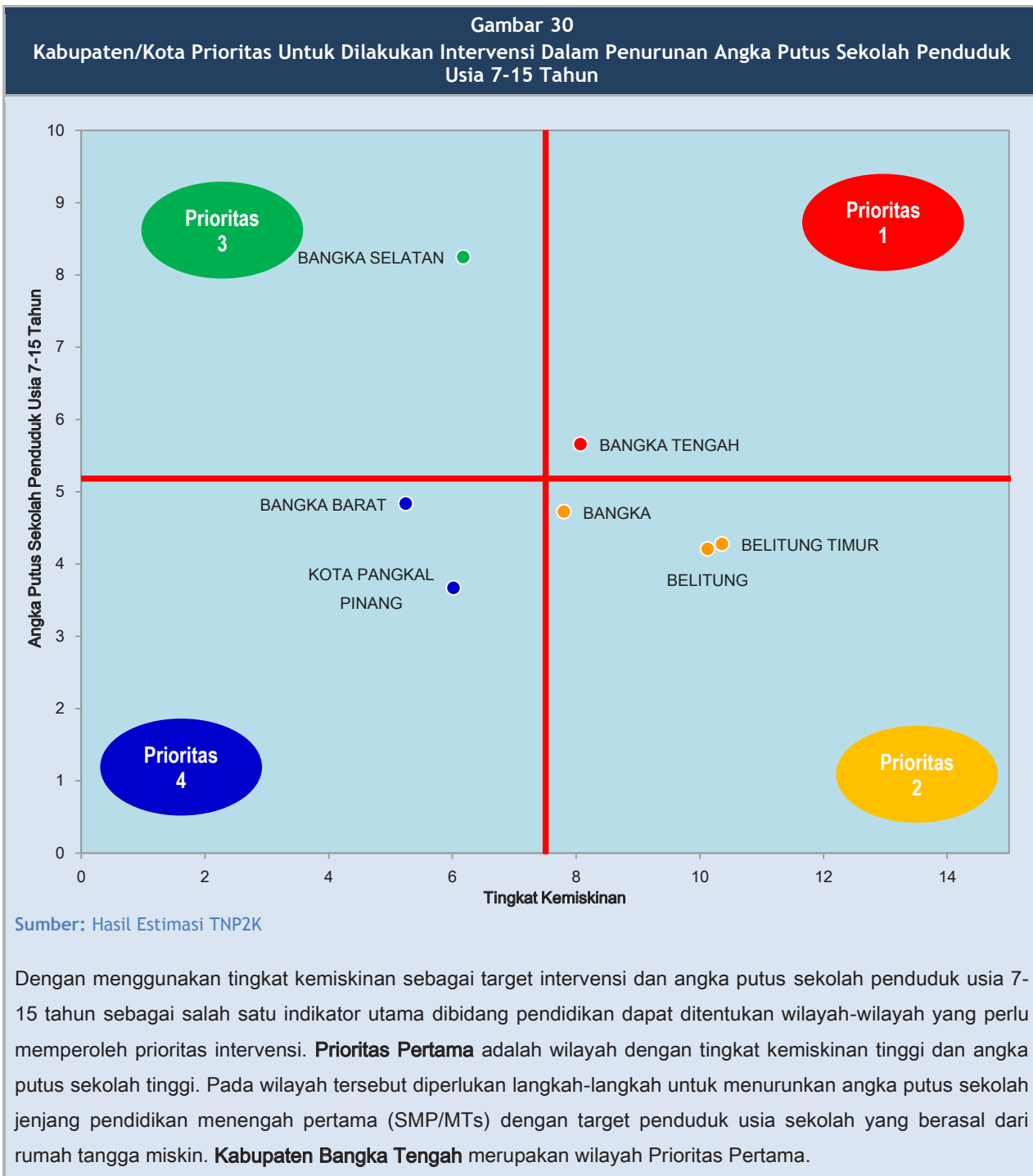
Keterangan:

*Air Bersih dihitung dengan menggunakan kontrol jarak dari tempat pembuangan kotoran/limbah

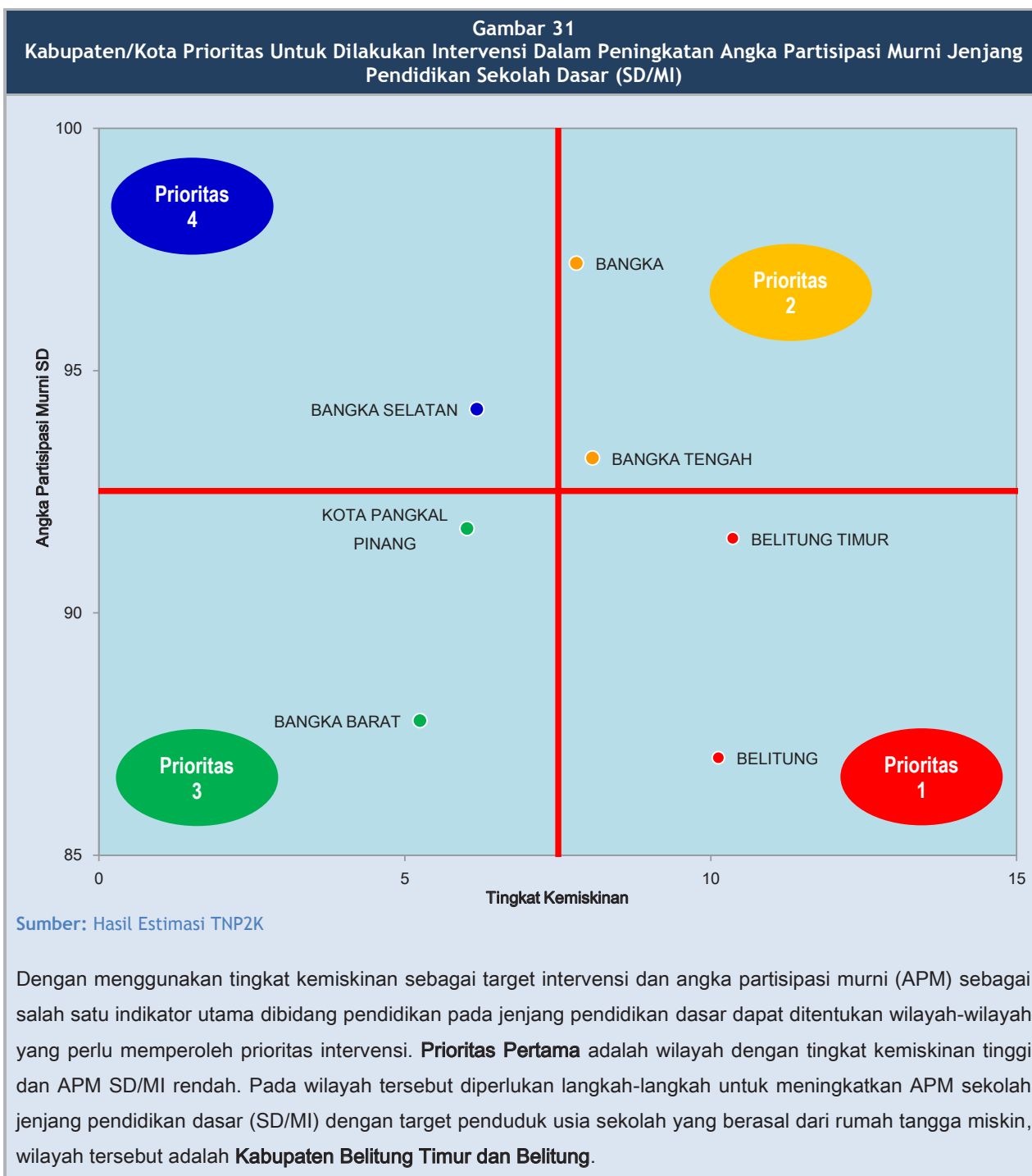
** Terdapat beberapa komponen dari Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI -Composite Food Security Index) yang tidak terhitung karena belum terdata secara lengkap.

*** Data tidak tersedia (wilayah pemekaran).

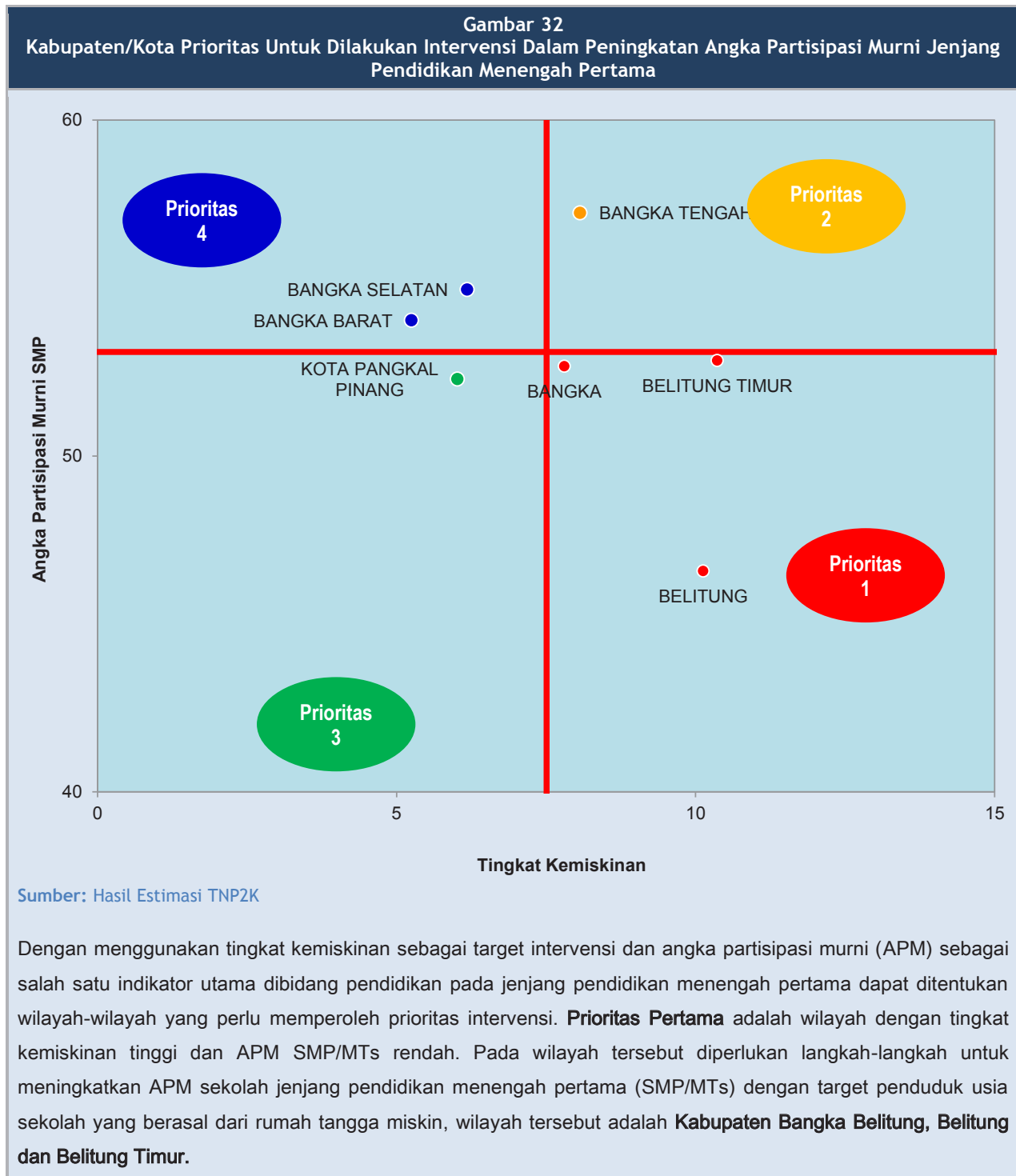
PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN



PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN



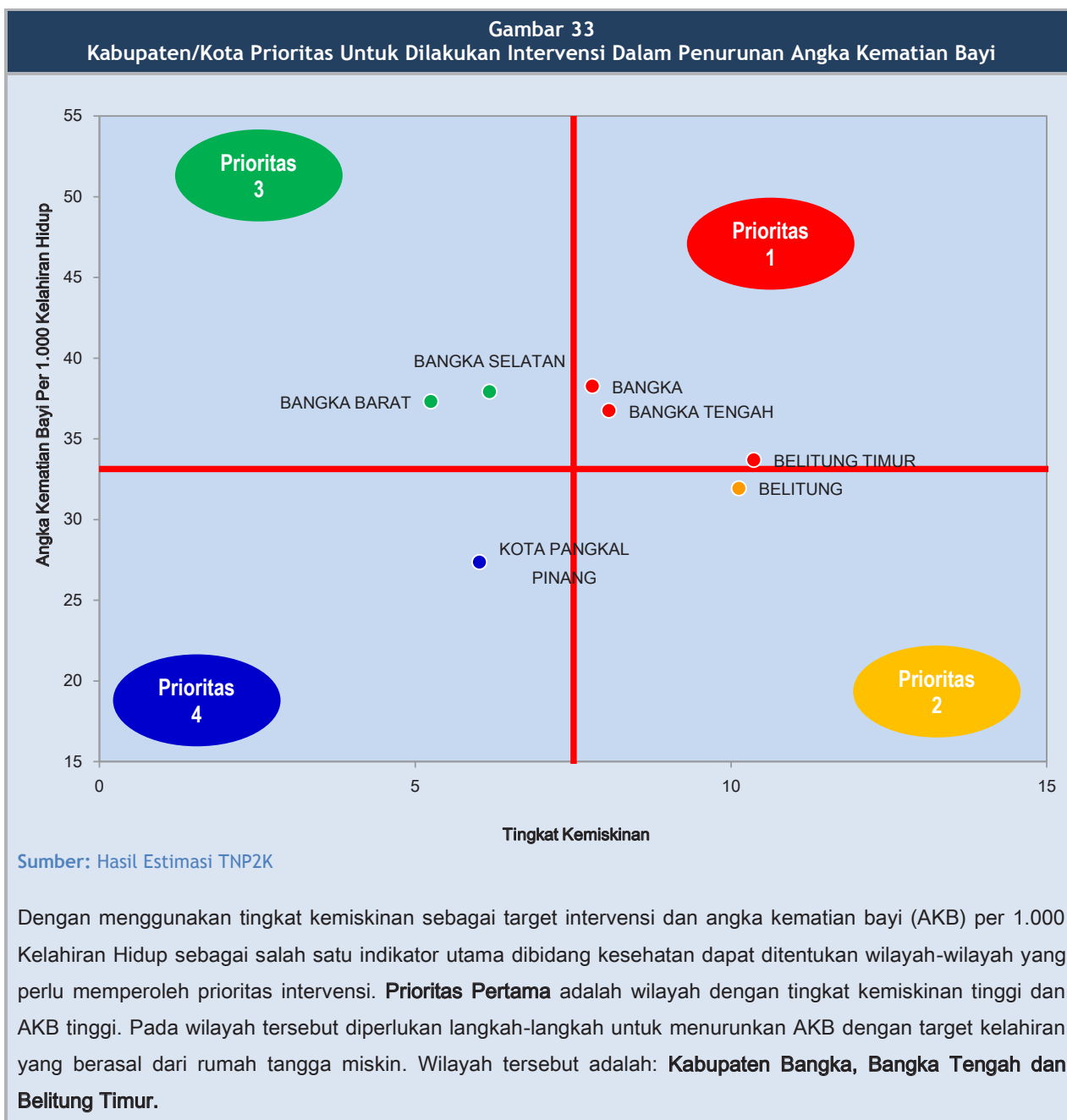
PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



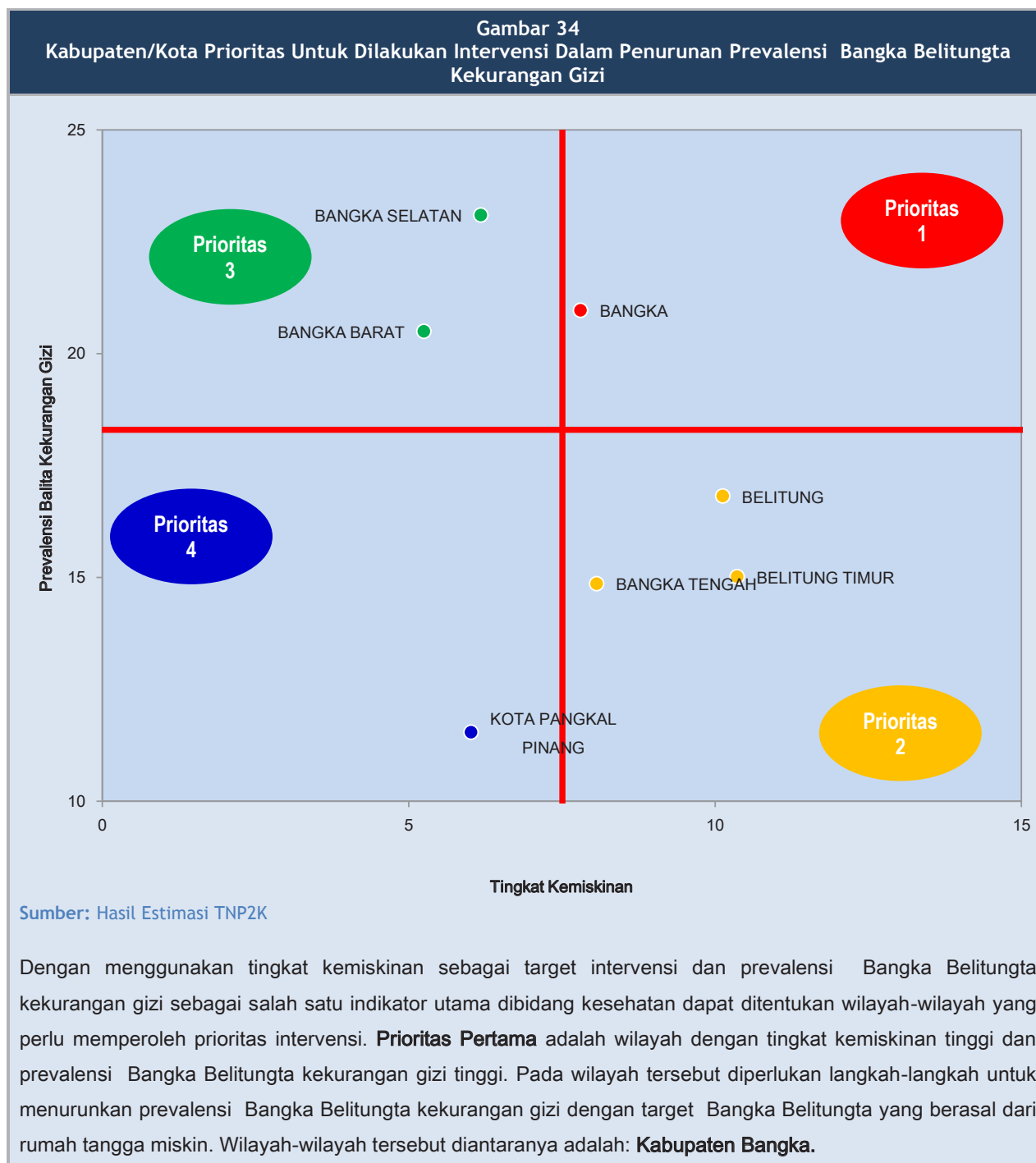
Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka partisipasi murni (APM) sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan APM SMP/MTs rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan APM sekolah jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin, wilayah tersebut adalah **Kabupaten Bangka Belitung, Belitung dan Belitung Timur**.

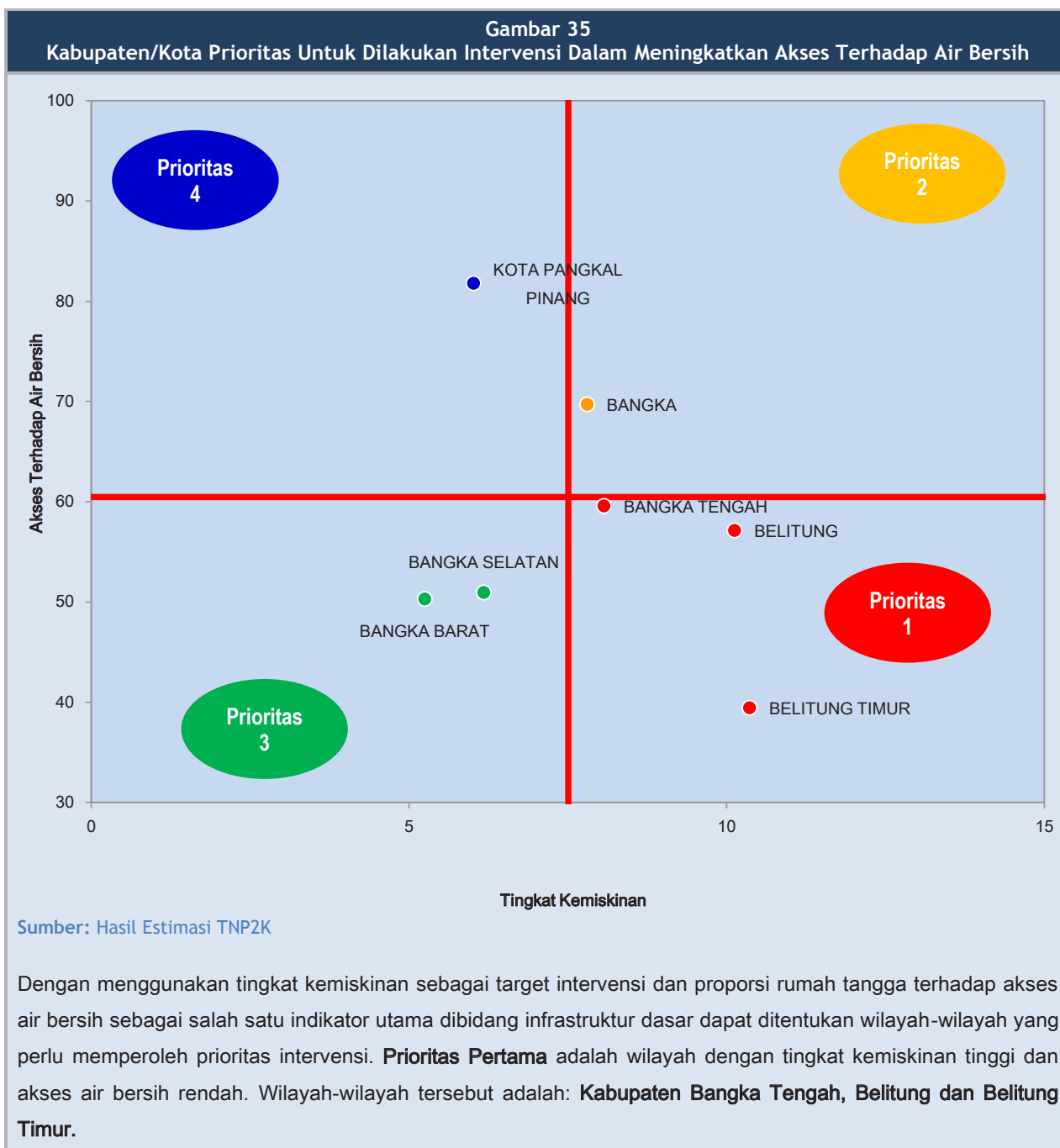
PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



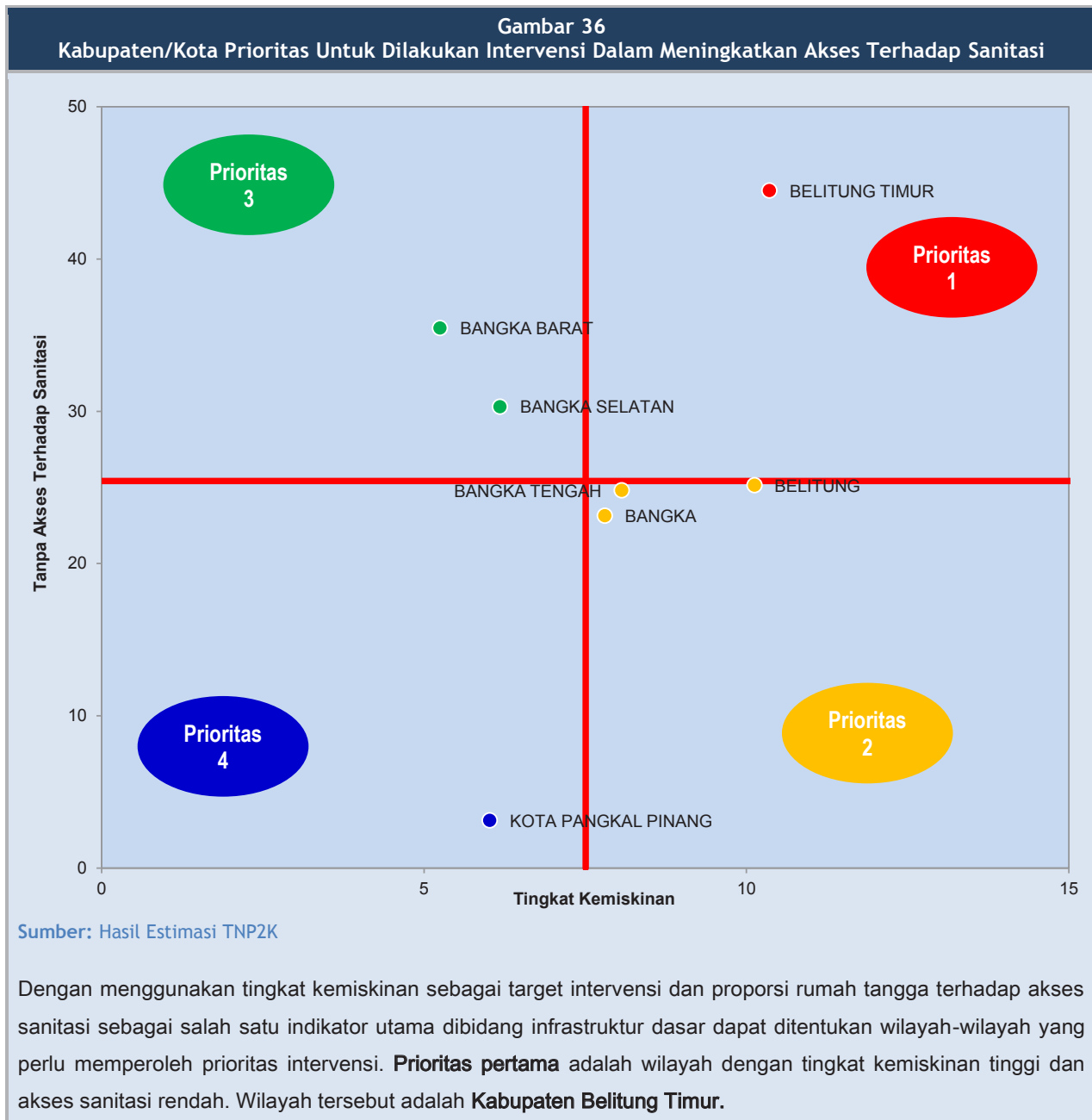
PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



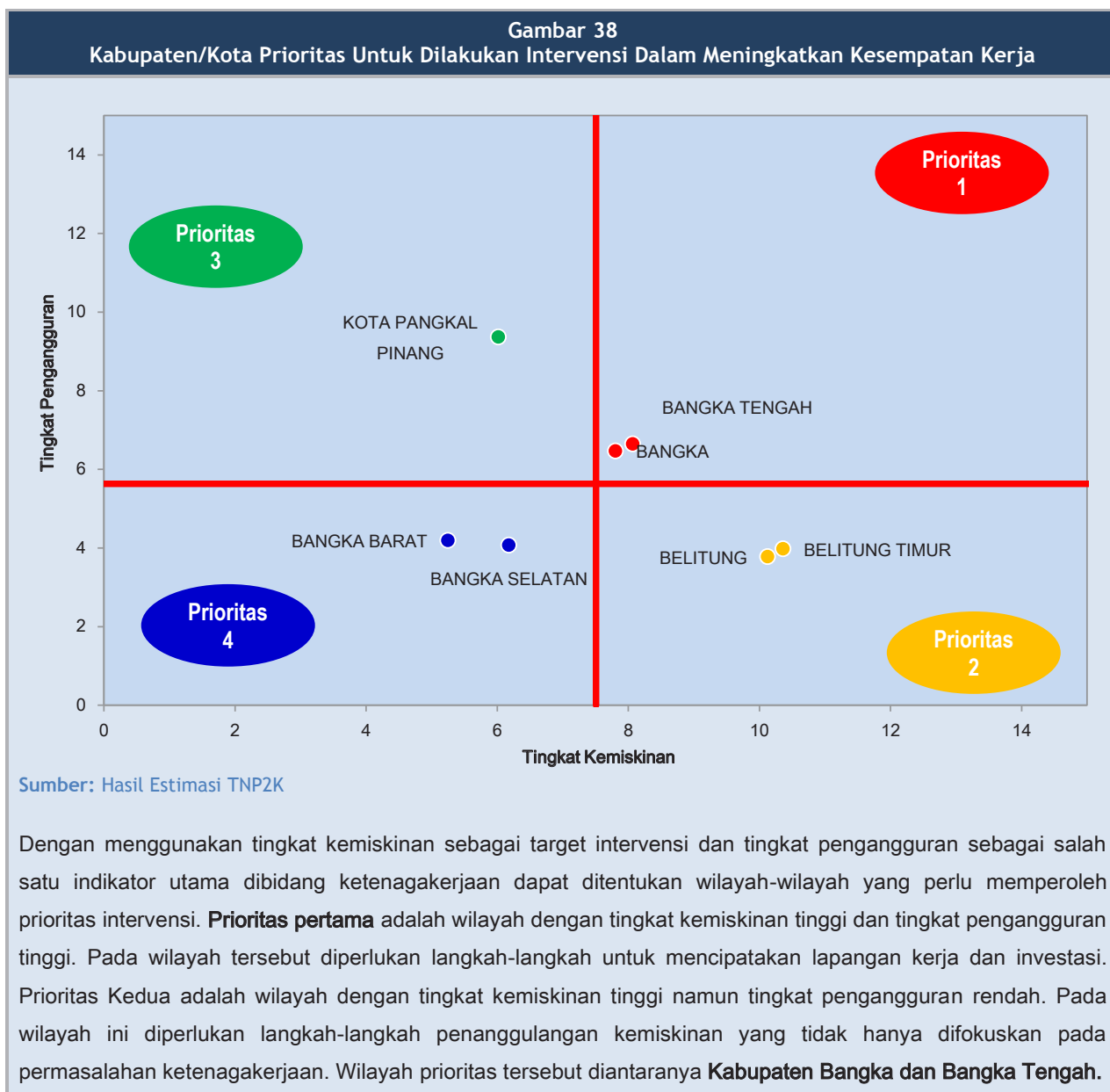
PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



PRIORITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN



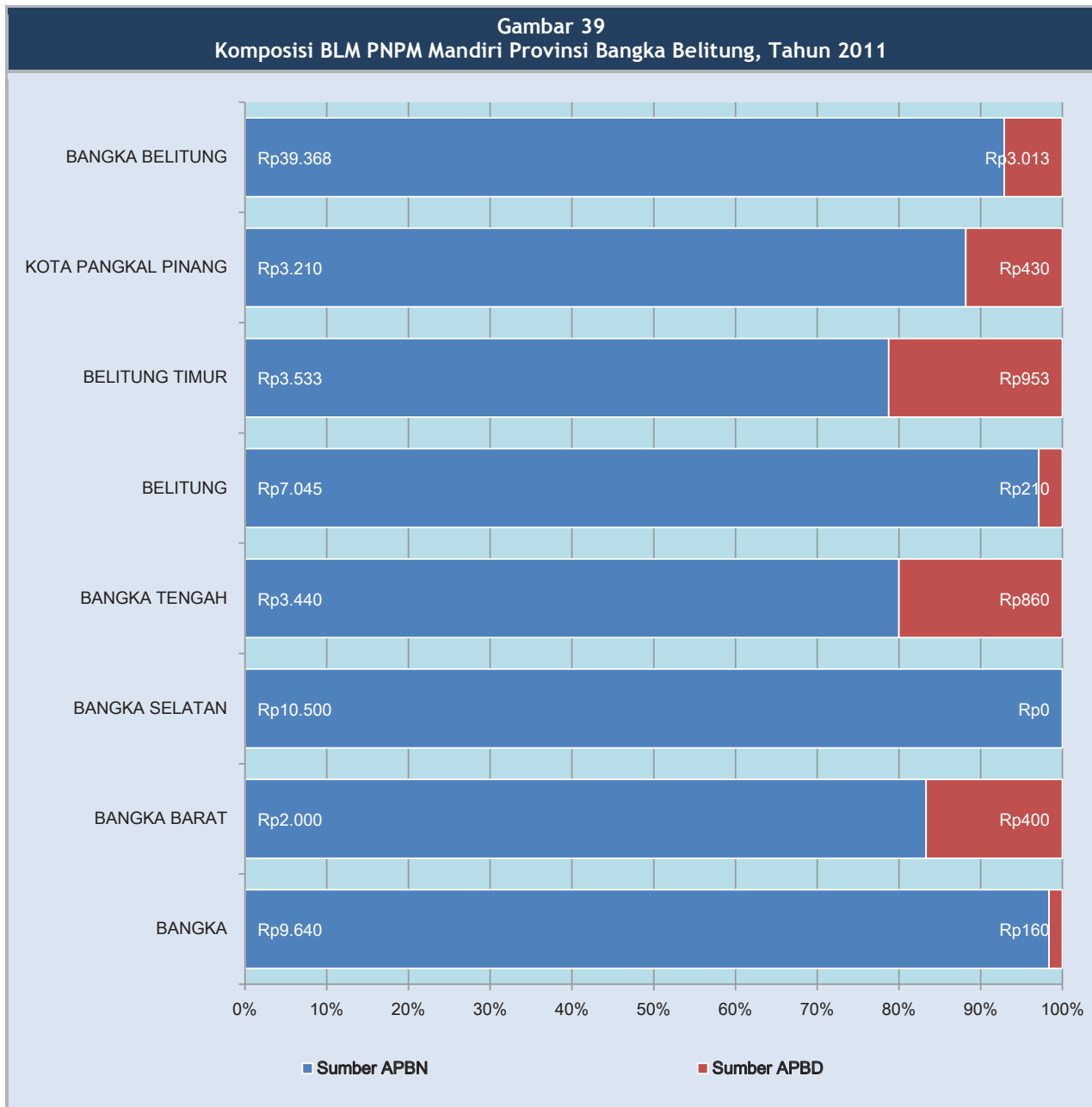
BIDANG-BIDANG PRIORITAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tabel 11
Rekapitulasi Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota⁷

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Th	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup	Prevalensi Balita Kurang Gizi	Akses Terhadap Air Bersih	Akses Terhadap Sanitasi	Akses Terhadap Listrik	Tingkat Pengangguran
BELITUNG TIMUR	2	1	1	1	2	1	1	1	2
BANGKA	2	2	1	1	1	2	2	2	1
BANGKA TENGAH	1	2	2	1	2	1	2	2	1
BELITUNG	2	1	1	2	2	1	2	1	2
BANGKA SELATAN	3	4	4	3	3	3	3	3	4
BANGKA BARAT	4	3	4	3	3	3	3	4	4
KOTA PANGKAL PINANG	4	3	3	4	4	4	4	4	3

Sumber: Ringkasan Hasil Estimasi TNP2K

⁷ Kabupaten/Kota dalam table di atas diurutkan berdasarkan rata-rata skor nilai Prioritas 1 hingga Prioritas 4.



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

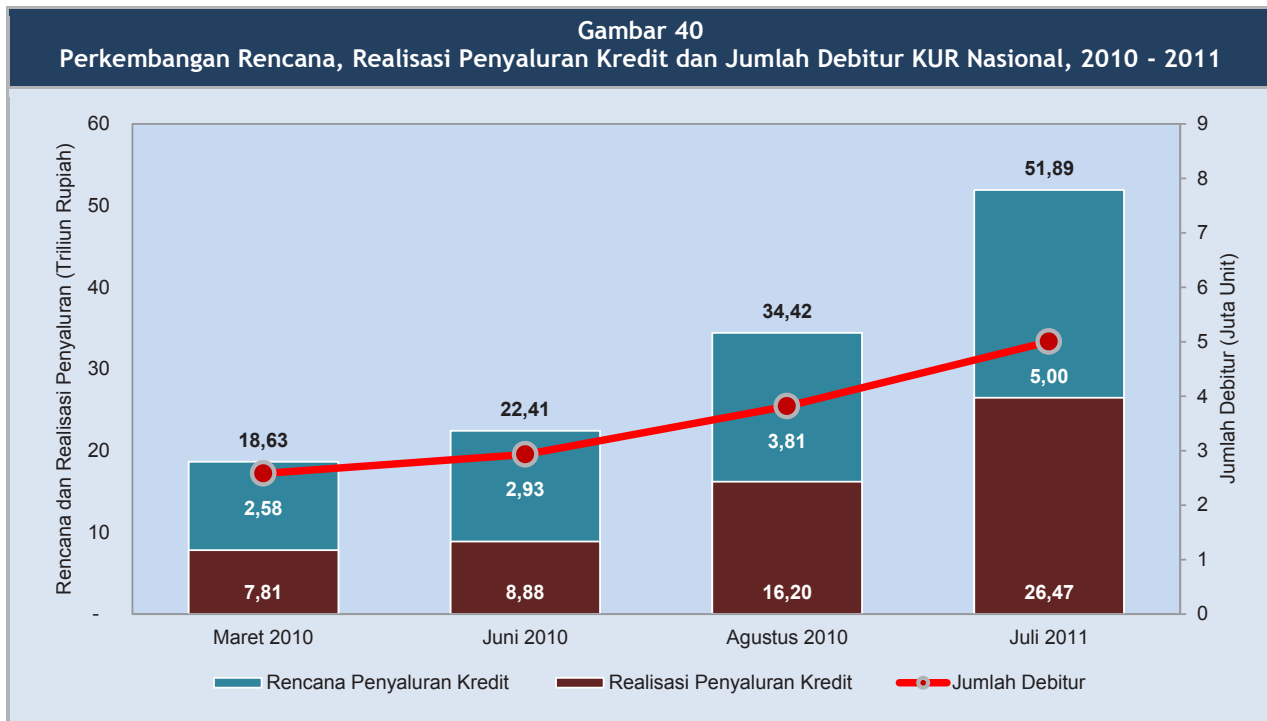
PNPM MANDIRI

Tabel 12.
Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah), Tahun 2011

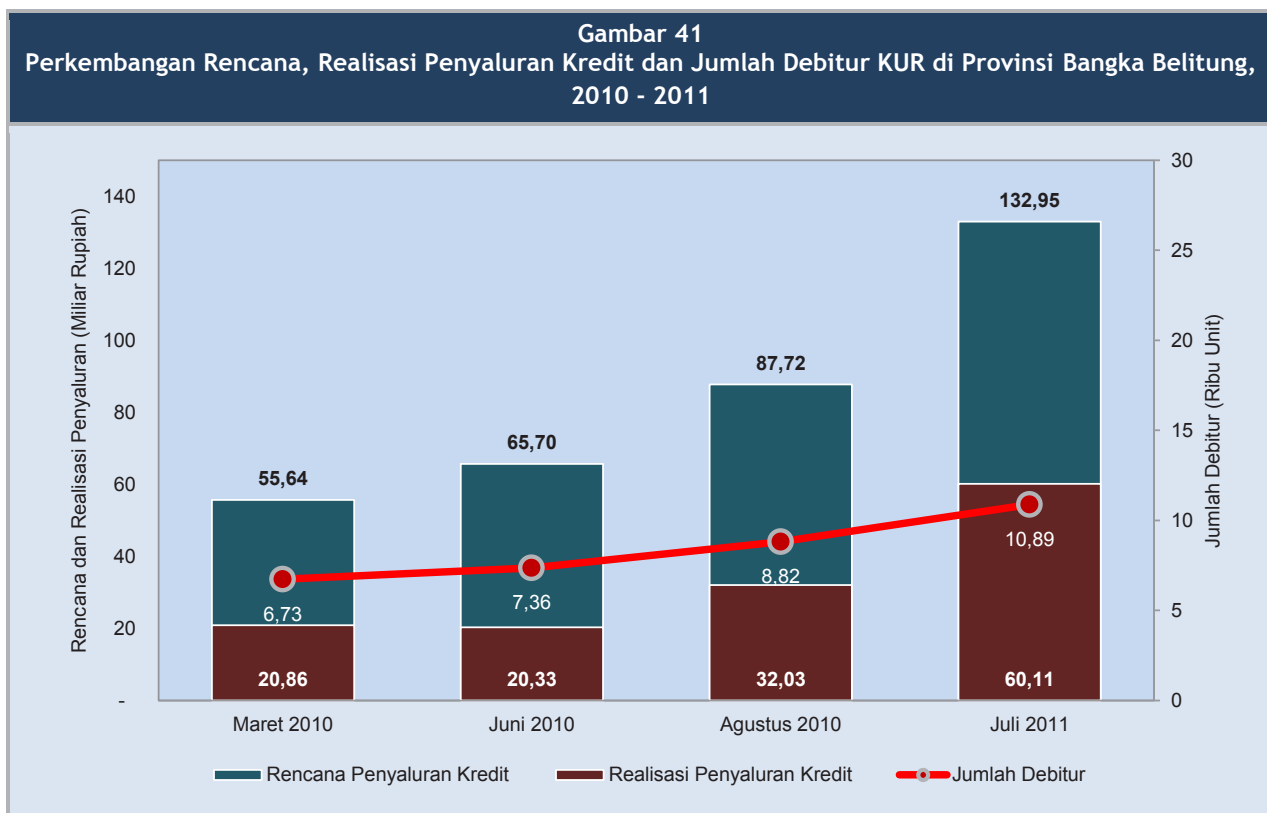
Daerah	PNPM Perdesaan	PNPM Perkotaan	PNPM PISEW	Total Alokasi BLM	Sumber APBN	Sumber APBD	Jumlah Kecamatan
	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Kec.
BANGKA		800	9.000	9.800	9.640	160	8
BANGKA BARAT	1.800	600		2.400	2.000	400	5
BANGKA SELATAN			10.500	10.500	10.500	0	7
BANGKA TENGAH	4.300			4.300	3.440	860	6
BELITUNG		1.255	6.000	7.255	7.045	210	5
BELITUNG TIMUR	2.400	2.086		4.486	3.533	953	6
KOTA PANGKAL PINANG		3.640		3.640	3.210	430	5
BANGKA BELITUNG	8.500	8.381	25.500	42.381	39.368	3.013	43

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

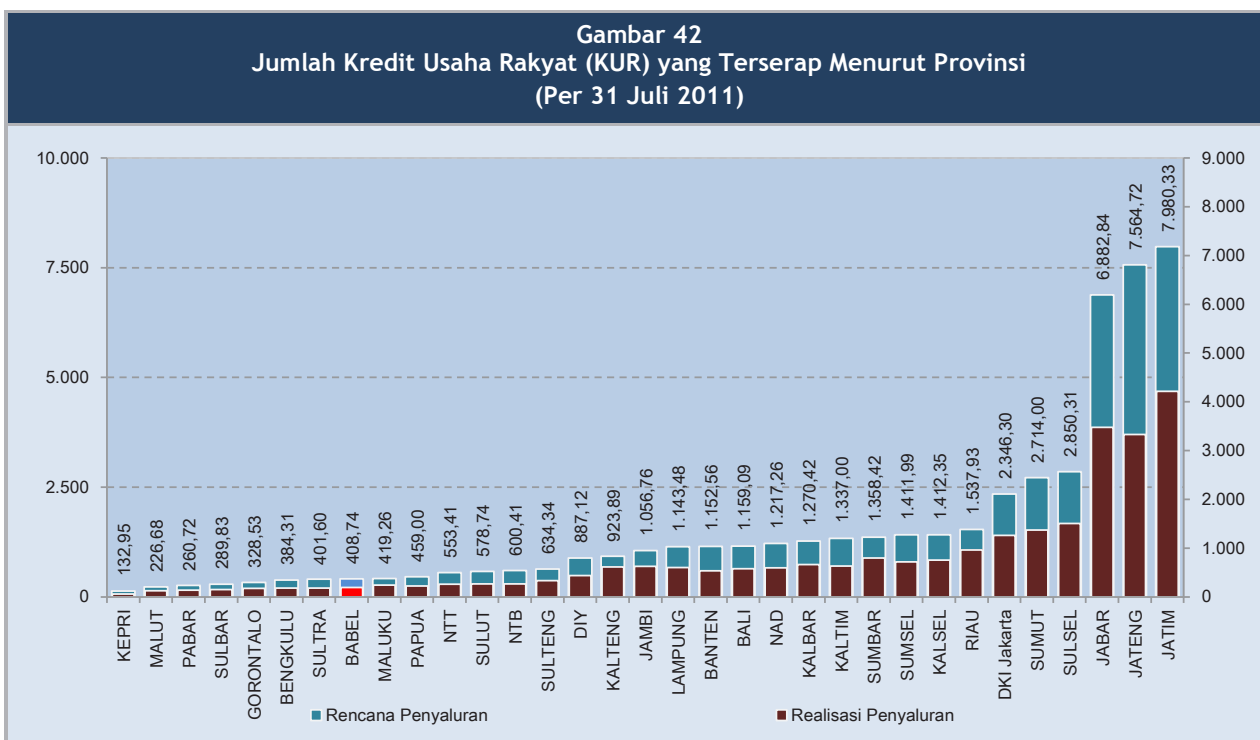


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

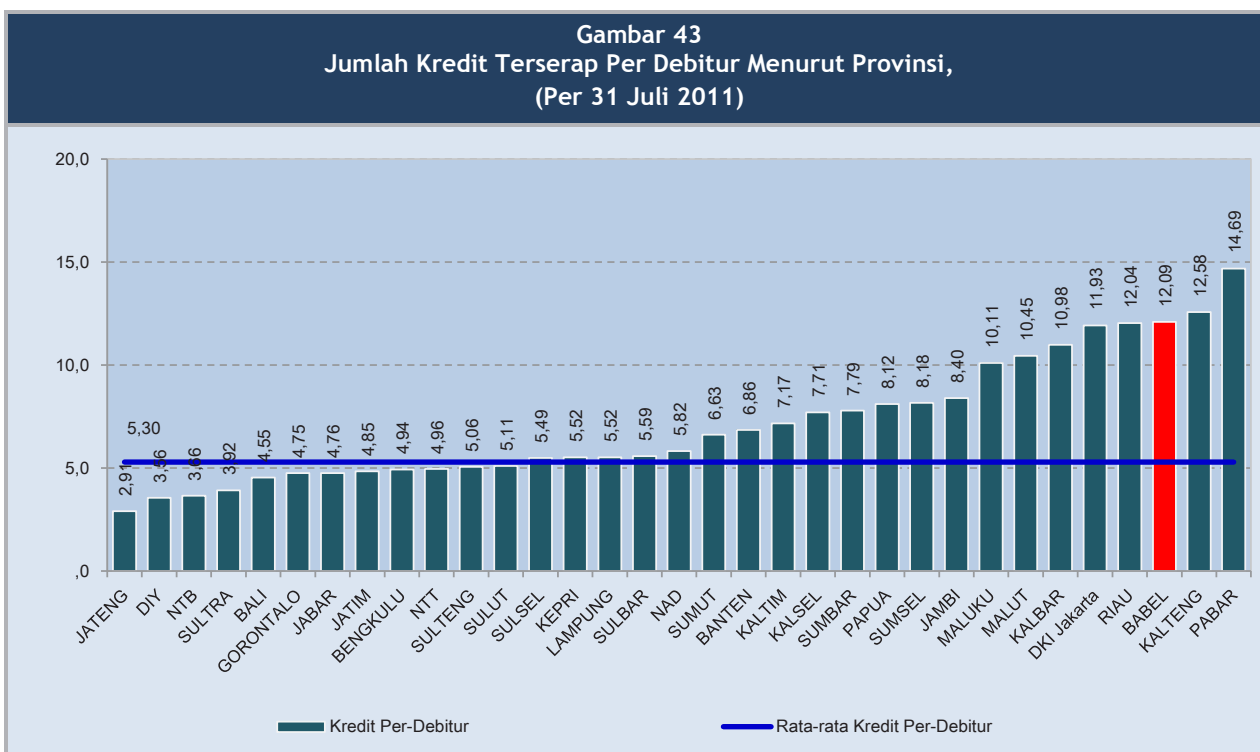


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

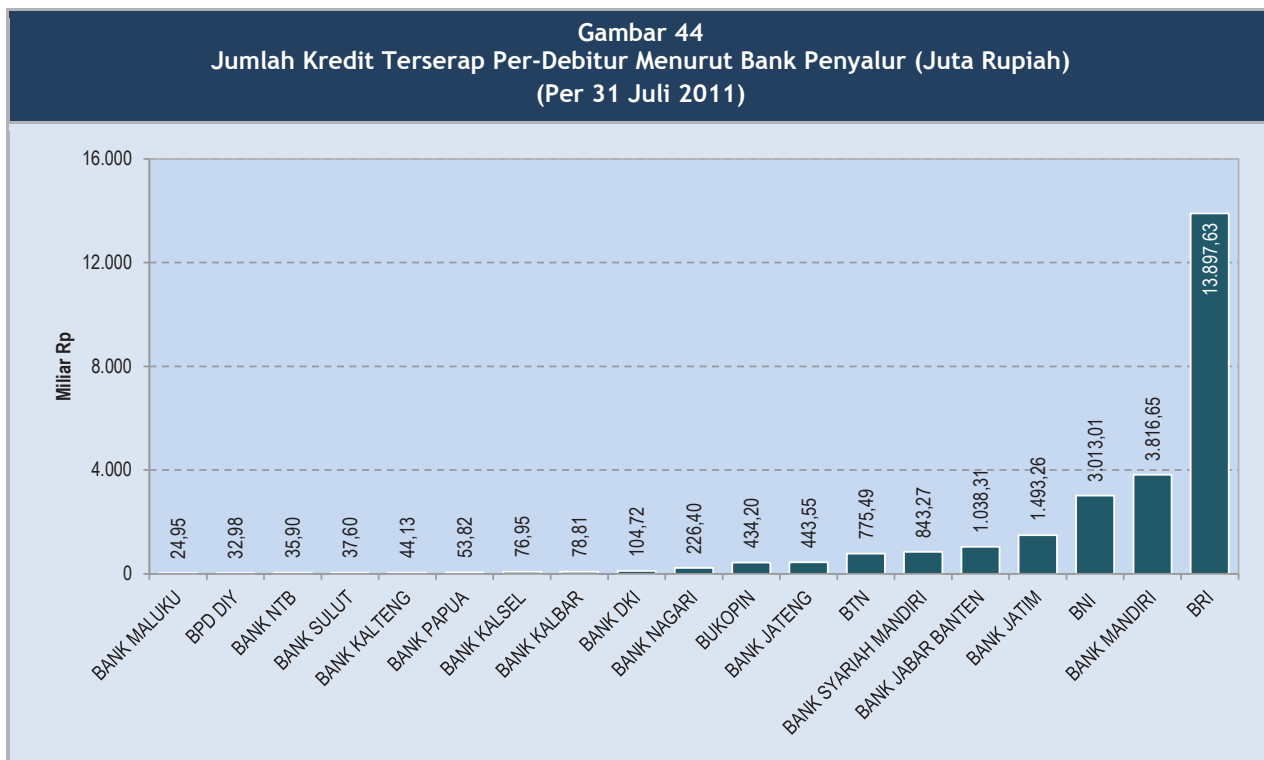


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

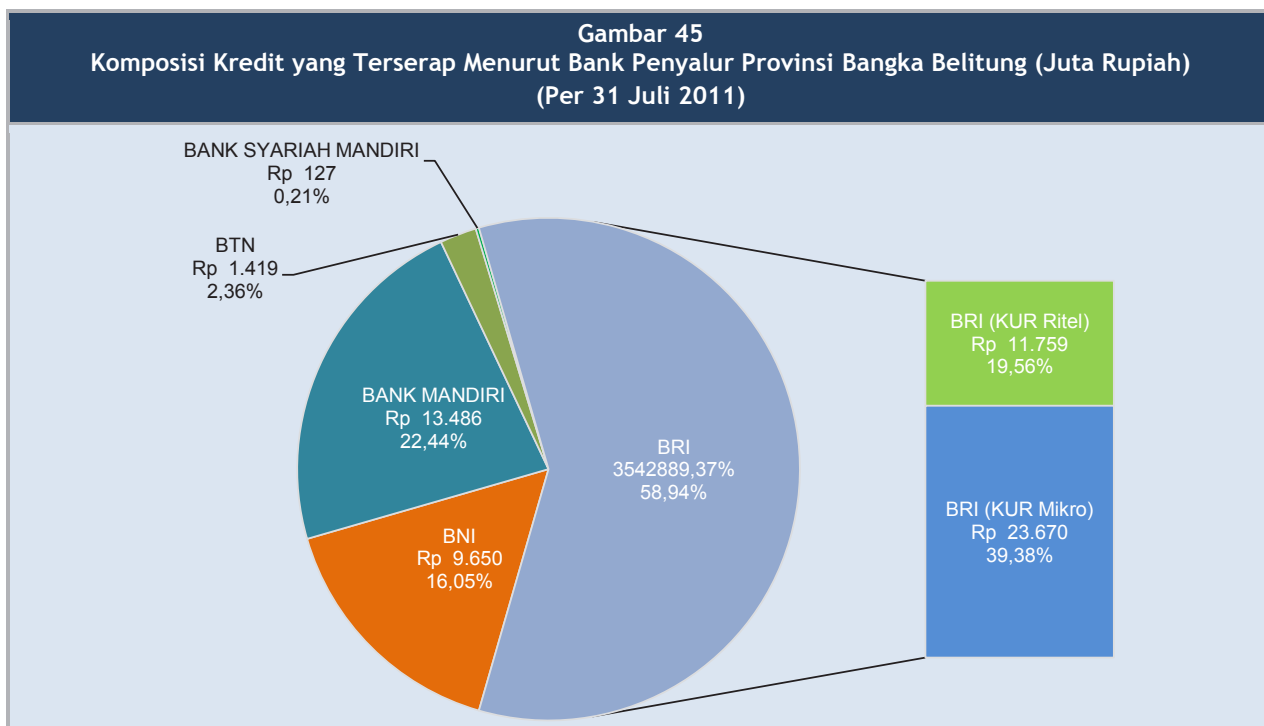


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

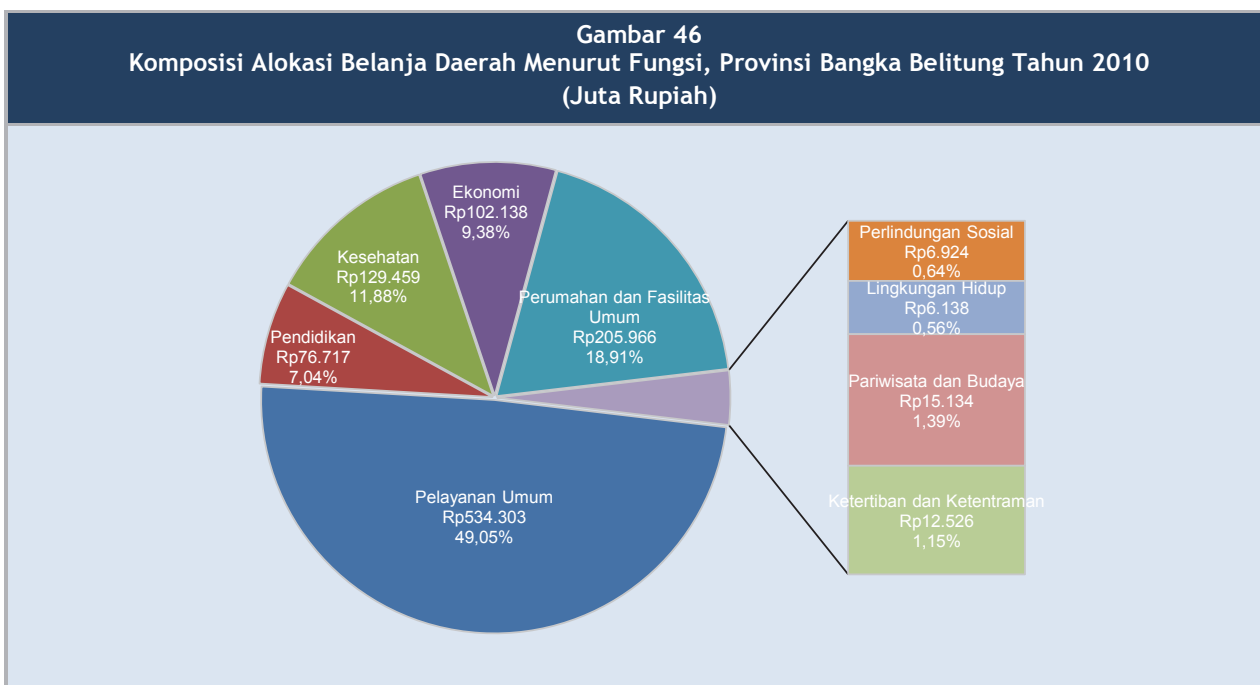


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

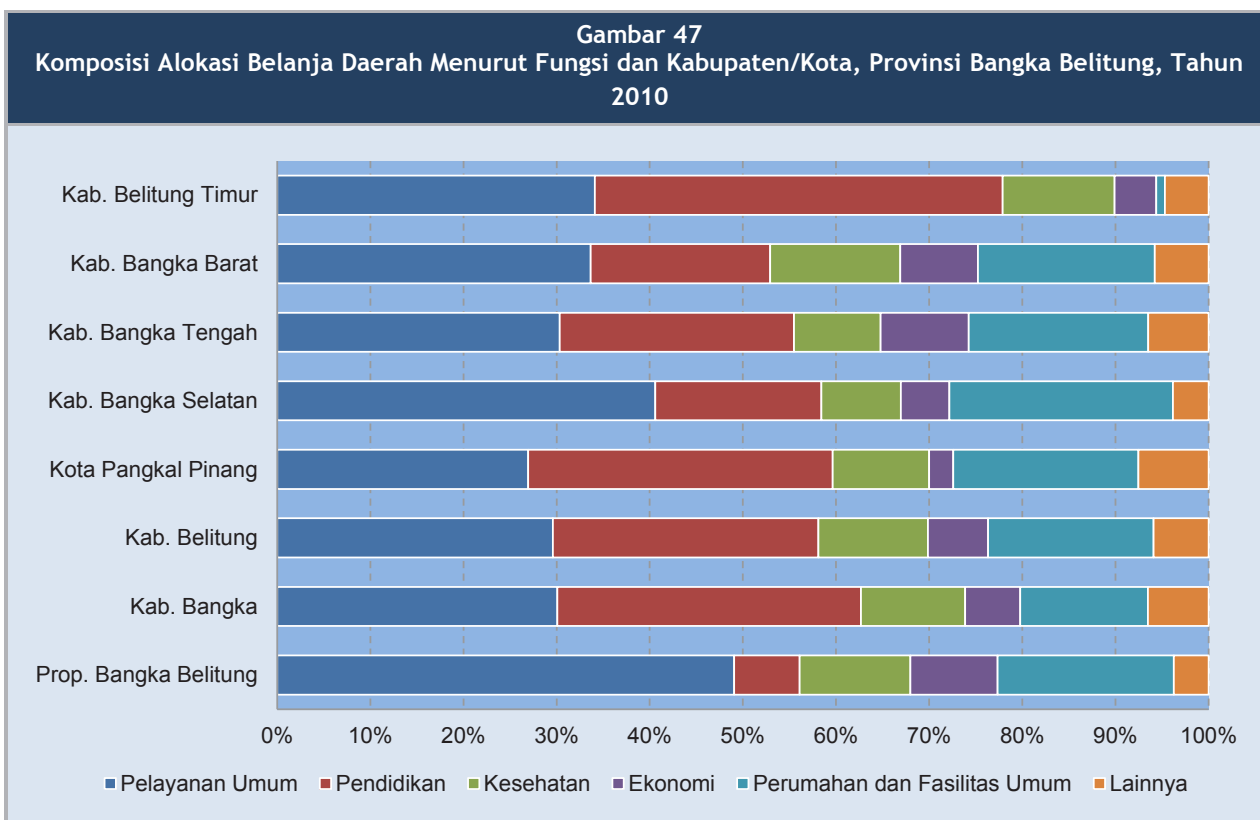


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KEUANGAN DAERAH



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010

Keterangan: Komposisi Alokasi Belanja Daerah merupakan angka Anggaran Tahun 2010 (Bukan nilai realisasi).